

NEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi Januari | Tahun 2022 No. 26

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN
REPLIKAN



H. Johan Rosihan, S.T

Catatan Awal Tahun 2022:

Pemerintah Gagal

*Atasi Fluktuasi Harga
Komoditas Pangan*



Tahun 2022, Pembuktian Kebijakan yang Tidak Tepat

Pemerintah pada awal tahun sudah memberikan resolusi untuk membebani masyarakat. Rencana kenaikan tarif dasar listrik serta penghapusan BBM jenis premium dan pertalite. Ironisnya, ini dilakukan saat harga-harga komoditas pangan melonjak tajam hingga 100% seperti telur, minyak goreng dan cabai.

Waktu berlalu, tahun berganti merambat menelusik masuk ke dalam ruang-ruang kosong. Sejumlah kebijakan masa lalu mulai terasa pada hari ini. Perlahan mulai dirasakan memberatkan dan memberikan beban bagi masyarakat. Meski pandemi melanda, tapi masih mengintai. Bisa saja dia kemudian menyergap kita pada krisis yang jauh lebih tajam dan dalam jika tidak waspada.

Pemerintah pada awal tahun sudah memberikan resolusi untuk membebani masyarakat. Rencana kenaikan tarif dasar listrik serta penghapusan BBM jenis premium dan

pertalite. Ironisnya, ini dilakukan saat harga-harga komoditas pangan melonjak tajam hingga 100% seperti telur, minyak goreng dan cabai.

Undang-undang Cipta Kerja telah 'dijewer' oleh Mahkamah Konstitusi (MK), namun Pemerintah nampak berjalan dengan kehendaknya sendiri. Merasa apa yang disampaikan oleh MK hanya sebagai catatan kecil yang bisa dihapus tanpa harus dikoreksi. Sebelum terjadi revisi sebagai amanat putusan MK, kepala pengambil kebijakan negara sudah bersegera memberi proteksi terhadap investasi bahwa semua tidak ada yang

berubah, baik-baik saja dan 'the show must go on'.

Pengabaian putusan seperti ini bukan kali pertama dan bisa jadi tidak akan menjadi yang terakhir, karena jika dicermati sudah menjadi pola dan habitual dasar otoritas dalam membuat sebuah kebijakan. Diberi kewenangan namun digunakan dengan perspektif kalah - menang (zero sum game), bukan menang - menang (win win solutions). Perlu diingat bahwa negara bukan sekadar ruang kompetisi, namun jauh lebih penting adalah ruang kontribusi. Setiap elemen masyarakat punya saham dan kontribusi yang

penting; tidak ada yang lebih besar.

Tidak hanya berhenti di situ, otoritas secara kasat mata alpa hadirkan keadilan di sejumlah aspek. Para pendukung dibiarkan berkicau dan meracau setiap hari dengan isi yang penuh kebencian, agitasi dan timbulkan friksi. Jangankan ditegur, yang ada malah diberi karpet merah. Situasi berkebalikan terjadi saat suara sumbang sampaikan saran dan kritik, palu hukum nampak tegas mengayun kancang meluncur. Tidak perlu hitungan pekan, dalam waktu yang singkat menyengap cepat.

Tahun ini kita akan melihat sejumlah kebijakan dan regulasi

yang dibuat pada tahun-tahun sebelumnya akan mulai berdampak dan membebani masyarakat. Memberi keleluasaan pada investasi yang sepihak, namun meminggirkan hak-hak rakyat yang berjuang. Situasi krisis seperti ini semakin nampak jelas, buktinya gesekan mulai terjadi antara elemen masyarakat. Tentu menjadi penting bagi setiap kita tetap menghadirkan iklim demokrasi yang sehat, partisipatif dan kondusif. Bukan sebaliknya yang menjadikan demokrasi sebagai alas meraih kekuasaan absolut.



2022

Awali dengan
semangat baru
Songsong hari esok
yang lebih baik

Catatan Awal Tahun 2022, Aleg PKS: Pemerintah Gagal Atasi Fluktuasi Harga Komoditas Pangan

KUTIPAN

Sumbawa (28/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai sepanjang tahun 2021 diwarnai dengan fluktuasi harga komoditas pangan yang tidak terkendali.

"Dimana harga selalu jatuh saat panen dan merugikan petani seperti jatuhnya harga gabah, harga jagung, cabai, bawang merah dan lain-lain," ujar Johan sebagai catatan penting akhir tahun 2021 yang harus diperhatikan pemerintah.

Menurut Johan, selama tahun 2021 ini malah produk pangan yang bersumber dari impor seperti daging & kedelai.

"Harganya terus melonjak yang berakibat merugikan pelaku UMKM serta merugikan konsumen karena daya beli yang semakin lemah pada masa pandemi ini," papar Johan.

Anggota Komisi IV DPR ini menggarisbawahi sejak awal tahun 2021 telah terjadi gejolak harga kedelai yang tidak terkendali dan kebijakan kenaikan

HET pupuk bersubsidi yang terjadi pada awal tahun 2021.

Johan menilai hal tersebut telah berdampak naiknya harga pangan sehingga pengeluaran rumah tangga terhadap pangan semakin meningkat dan menambah beban rumah tangga petani untuk melaksanakan kegiatan usaha taninya.

"Disisi lain, bahwa pemerintah terlihat tidak berdaya melakukan upaya untuk meningkatkan produksi pangan karena keterbatasan anggaran," cetusnya.

Johan juga menyatakan bahwa pada tahun 2021 ini telah terjadi pergerakan kenaikan harga minyak goreng yang terus melambung.

"Padahal Indonesia merupakan negara produsen minyak

sawit (CPO) terbesar di dunia dengan pertumbuhan rata-rata 3,61% per tahun," ujarnya.

Politisi Senayan ini menyinggung bahwa pada awal tahun 2021 lalu pemerintah berencana melakukan impor 1 juta ton beras dan hal ini telah menimbulkan polemik.

"Penolakan luas juga terjadi dari komponen masyarakat dan Presiden Jokowi pun berjanji tidak akan melakukan impor beras namun kenyataannya realisasi impor beras mencapai 41.000 ton pada tahun 2021," ujar Johan.

Politisi PKS ini juga menyoroti bahwa Tahun 2021 belum ada kebijakan untuk mengurangi beban biaya produksi yang harus dikeluarkan petani seraya mencontohkan ternyata subsidi pupuk banyak yang tidak tepat sasaran.

"Tidak ada kebijakan harga yang diterima petani sebagai harga yang layak untuk meningkatkan nilai pendapatan petani terhadap komoditas Pertanian yang dihasilkannya", ucap Johan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.
Anggota Komisi IV DPR RI

"Saya melihat selama ini Pemerintah tidak fokus memperhatikan pengembangan lahan pertanian produktif terutama di Pulau Jawa yang luasnya terus menurun serta tidak punya visi membangun kemandirian pangan nasional melalui program swasembada pangan"

Fraksi PKS Raih KWP Award Paling Peduli Bencana

KUTIPAN

Jakarta (16/12) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menjadi salah satu fraksi yang mendapat penghargaan sebagai Fraksi yang Peduli Isu Bencana Alam dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Award 2021 .

KWP sendiri merupakan wadah organisasi wartawan yang meliputi kegiatan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Menurut KWP, Fraksi PKS selalu aktif dan hadir dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Fraksi PKS selalu terdepan menggalang bantuan melalui pemotongan gaji anggota dewan dari pusat hingga daerah untuk meringankan beban korban bencana alam.

Bahkan struktur dan kader PKS hadir di kesempatan pertama mendirikan posko guna membantu proses evakuasi dan mitigasi bencana bersama aparat dan elemen kebencanaan lainnya.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengucapkan terima

kasih atas penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi organisasi wartawan parlemen kepada Fraksi PKS. Penghargaan ini meletuk PKS untuk terus melayani rakyat terutama kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah.

"Aksi kepedulian Fraksi PKS dalam setiap bencana semata-mata merupakan bentuk solidaritas sosial nasional. Kita tahu kemampuan pemerintah mungkin terbatas, sementara respon dan mitigasi bencana dibutuhkan kecepatan agar mampu menyelamatkan banyak korban. Dengan solidaritas sosial nasional kita bisa keluar dari semua musibah dan krisis yang dihadapi bangsa ini," pesannya.

Ketua Fraksi PKS DPR ini

akan terus meningkatkan pelayanan anggota dewan PKS dari pusat hingga daerah kepada rakyat. Setiap terjadi bencana alam, kami pastikan PKS selalu hadir dengan kepedulian dan bantuan.

Selain itu, Fraksi PKS membuka lebar-lebar kantornya di DPR dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menerima rakyat melalui Program Hari Aspirasi Rakyat yang sudah berjalan bertahun-tahun. Aspirasi tersebut kami formulasikan dalam kebijakan legislatif yang berpihak pada rakyat, bangsa, dan negara. Hal ini sejalan dengan garis perjuangan Fraksi PKS yaitu pro kerakyatan, pro keummatan, dan pro pengokohan nasionalisme Indonesia.

"Inilah makna kehadiran kami sebagai wakil rakyat PKS, untuk memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat bangsa dan negara. Serta selalu peduli dan melayani rakyat sesuai kewenangan dan kemampuan yang ada pada kami," pungkas Jazuli.



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Aksi kepedulian Fraksi PKS dalam setiap bencana semata-mata merupakan bentuk solidaritas sosial nasional. Kita tahu kemampuan pemerintah mungkin terbatas, sementara respon dan mitigasi bencana dibutuhkan kecepatan agar mampu menyelamatkan banyak korban. Dengan solidaritas sosial nasional kita bisa keluar dari semua musibah dan krisis yang dihadapi bangsa ini,"

Kongkrit Fraksi PKS Serahkan Hasil Potong Gaji Aleg Untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

KUTIPAN

Surabaya (21/12) --- Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini secara simbolis menyerahkan bantuan untuk korban erupsi Gunung Semeru kepada Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan bersamaan dengan acara konsolidasi Aleg PKS Jawa Timur di Kota Malang, Senin 20 Desember 2021.

"Penyerahan bantuan ini wujud nyata kepedulian dan pelayanan PKS kepada rakyat terutama untuk saudara-saudara kita di sekitar Gunung Semeru Lumajang Jawa Timur. Kita serahkan secara simbolik pada acara konsolidasi aleg Jawa Timur ini untuk menegaskan bahwa tugas utama kita melayani rakyat," ungkap Jazuli.

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini menyerahkan bantuan kolektif yang diperoleh dari pemotongan gaji anggota legislatif dan pejabat publik PKS kepada DPW PKS Jawa Timur yang memimpin tanggapan darurat bencana di lokasi Gunung Semeru sejak hari

pertama erupsi terjadi. Fraksi PKS sendiri sudah 8 kali melancarkan kebijakan pemotongan gaji pejabat publiknya selama tahun 2021. Pemotongan gaji tersebut diberikan kepada daerah yang terkena musibah bencana alam di Indonesia, salah satunya erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada 4 Desember 2021 lalu.

"Ini bentuk empati dan tanggung jawab publik PKS untuk mengokohkan solidaritas sosial nasional kita. Sengaja kami serahkan kepada DPW PKS Jawa Timur yang memimpin para relawan sehingga paling memahami kebutuhan korban erupsi.

Semoga bantuan ini bermanfaat bagi para korban untuk melewati musibah ini," ungkap Jazuli.

Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan mengatakan PKS telah mendirikan posko sejak hari pertama erupsi Semeru di dua lokasi, yakni di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro. Posko tersebut untuk sementara waktu didirikan selama 30 hari pasca erupsi, dan sebagai tempat untuk pendistribusian bantuan bagi korban erupsi Gunung Semeru.

"Di posko ini terdapat beberapa relawan. Tak hanya dari Kota Kabupaten di Jatim, tapi juga ada relawan dari provinsi lain yang datang ke posko kami," ucapnya. Dia menjelaskan, relawan PKS juga melakukan evakuasi jenazah korban yang tertimbun lumpur, distribusi makanan minuman dan air bersih.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Fraksi PKS DPR Dكتور Jazuli Juwaini yang hari ini menyerahkan bantuan dana dari pejabat publik PKS. Bantuan ini sangat bermanfaat



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Ini bentuk empati dan tanggung jawab publik PKS untuk mengokohkan solidaritas sosial nasional kita. Sengaja kami serahkan kepada DPW PKS Jawa Timur yang memimpin para relawan sehingga paling memahami kebutuhan korban erupsi. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi para korban untuk melewati musibah ini

dan langsung disalurkan melalui Posko PKS untuk pengadaan makanan, air bersih, perlengkapan pengungsi seperti pakaian layak pakai,

perlengkapan bayi, obat-obatan hingga layanan kesehatan gratis baik di rumah-rumah yang masih di huni maupun tempat pengungsian," pungkasnya.



Kokohkan Kecintaan Bangsa

Fraksi PKS Selenggarakan Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa

KUTIPAN

Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan final Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis (23/12).

Dalam kata sambutannya, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyatakan bahwa lomba ini adalah program unggulan Fraksi PKS sebagai bentuk komitmen kebangsaan FPKS untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Lomba ini merupakan bentuk komitmen kebangsaan PKS dalam menjaga kesatuan dan persatuan NKRI. Melalui lomba ini, PKS ingin menekankan bahwa bangsa dan negara ini adalah milik bersama dan merupakan kewajiban seluruh komponen untuk menjaganya" ujar Jazuli Juwaini.

Fraksi PKS ingin mengajak seluruh komponen anak bangsa ini untuk memahami sejarah perjalanan bangsa ini secara utuh. Menurut Jazuli, hal ini sangat penting sebab Indonesia saat ini memasuki zaman teknologi digital yang penuh



informasi berlimpah. Zaman ini berpotensi untuk mengikis ingatan anak bangsa terhadap sejarah perjuangan bangsa. Tentunya ini akan berdampak pada menurunnya rasa nasionalisme.

"Dunia seperti satu kamar, semua informasi terkait dunia luar bisa kita akses. Jangan sampai adanya zaman ini dapat menyebabkan putusnya ingatan anak bangsa terhadap sejarah perjuangan pahlawan bangsa kita" ujar Jazuli.

Ditambah lagi, Fraksi PKS mencium adanya upaya untuk menghapus ingatan bangsa terhadap sejarah bangsa. Salah satunya kasus penghapusan nama KH Hasyim Asy'ari dalam

Kamus Sejarah Indonesia pada April 2021 silam.

"Hal ini menimbulkan keprihatinan dari kami sehingga kami kritik dan tentang keras kejadian tersebut" kata Jazuli.

Selain itu, Fraksi PKS juga mengajak agar seluruh komponen bangsa mampu meneladani ketulusan pengorbanan tokoh bangsa. Menurut Jazuli, jika seluruh komponen bangsa mampu melaksanakan itu khususnya para pengambil kebijakan, hal ini akan berdampak positif kepada kondisi bangsa.

"Andai seluruh pengambil kebijakan berpikir seperti ini, kondisi bangsa ini akan jauh lebih baik. Sebagai contoh, dengan kondisi yang sangat susah saat ini, tidak selayaknya ada usulan RUU IKN. Karena itu, Fraksi PKS akan menolak RUU ini" ujar Jazuli.

Jazuli berharap agar lomba yang diselenggarakan ini dapat menumbuhkan kecintaan yang kokoh kepada para pahlawan, sehingga kita semua dapat meneladani mereka.

"Kegiatan ini tidaklah seberapa, tetapi inilah aksi



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten II

"Lomba yang diselenggarakan ini dapat menumbuhkan kecintaan yang kokoh kepada para pahlawan, sehingga kita semua dapat meneladani mereka. Kegiatan ini tidaklah seberapa, tetapi inilah aksi kami untuk membangun kesadaran agar para pahlawan tidak terlupakan"

kami untuk membangun kesadaran agar para pahlawan tidak terlupakan" tutup Jazuli.

Jazuli juga berpesan agar keluarga besar PKS dan

komponen bangsa lainnya agar terdepan dalam membela kepentingan bangsa dan negara. Karena negeri ini merupakan milik bersama.

Babak Final Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa

Ketua MPP PKS: Tumbuhkan Literasi Sejarah Bagi Penerus Bangsa

KUTIPAN

Jakarta (23/12) – Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suswono mengapresiasi terselenggaranya Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR-RI.

Hal ini disampaikan dalam Pidato Penutup Babak Final Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa pada hari ini Kamis (23/12/2021)

“ Kami apresiasi atas terselenggaranya satu ide yang kreatif ya, metode yang sangat tepat dalam melakukan pembelajaran Pendidikan kepada publik ” ucapnya melalui Zoom.

Suswono juga menyoroti banyaknya partisipasi yang berasal dari kalangan millennial. Hal ini menurutnya adalah suatu kebanggaan karena melalui lomba ini,



diharapkan generasi masa kini dapat mempelajari lebih jauh tentang para Tokoh Bangsa yang dilombakan

Lebih Lanjut, ia juga menjelaskan bahwa lomba ini merupakan upaya dari PKS untuk mempertegas Kembali visi kebangsaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

“ Acara ini menumbuhkan Literasi Sejarah ya, dengan fokus utama agar generasi penerus ya memiliki kesadaran sejarah dan Warisan tokoh-tokoh besar yang dimiliki bangsa Indonesia, sehingga bukan hanya paham sejarah, tetapi juga mengerti bagaimana harus bersikap dalam menjaga Indonesia ini” Tutar Suswono la pun Berharap agar Fraksi PKS Terus melanjutkan jalannya Lomba ini dengan format yang jauh lebih kreatif dan bisa mendorong semangat dari para generasi muda bangsa Indonesia untuk terus belajar dan bisa lebih mengenal Kembali sejarah dari para Tokoh-tokoh bangsa Indonesia



Dr. Ir. H. SUSWONO, MMA
Ketua MPP PKS

“Lomba yang diselenggarakan ini dapat menumbuhkan kecintaan yang kokoh kepada para pahlawan, sehingga kita semua dapat meneladani mereka. Kegiatan ini tidaklah seberapa, tetapi inilah aksi kami untuk membangun kesadaran agar para pahlawan tidak terlupakan”



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



Wakil Ketua FPKS Dukung Indonesia Untuk Konsisten Bela Palestina

KUTIPAN

Jakarta (25/12) — Beredar laporan dari media-media massa Israel bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken dikabarkan mengangkat wacana normalisasi hubungan Israel dan Indonesia pada saat mengunjungi Jakarta pada 13-14 Desember lalu.

Menanggapi pemberitaan tersebut Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menyampaikan harapan dan sekaligus dukungannya terhadap Pemerintah Indonesia yang terus konsisten mendukung pembebasan Palestina dari penjajahan Israel.

"Kami mengapresiasi sikap konsisten pemerintah Indonesia selama ini, khususnya kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang menyampaikan suasan hati dan perasaan rakyat Indonesia untuk terus mendukung Palestina merdeka dan harapan kami agar Pemerintah RI tidak akan

membangun hubungan diplomatik apapun dengan Israel dalam pertemuan dengan Menlu AS, Anthony Blinken," tegas Sukamta.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga memahami bahwa tawaran normalisasi tentu dengan iming-iming menggurkan. Maka tidak mengherankan banyak negara yang dahulu tidak membangun hubungan diplomatik dengan Israel kemudian berubah sikap, luluh dengan beragam tawaran Israel dan Amerika Serikat.

"Kami tahu, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia memiliki posisi sangat strategis dan akan memberikan dampak signifikan bagi Israel

jika bersedia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Tentu godaan normalisasi dengan Israel ini luar biasa. Sejak zaman presiden Donald Trump tawaran turut serta dalam Kesepakatan Abraham banyak negara telah beralih sikap. Namun, kita harus ingat bahwa urusan normalisasi dengan Israel ini lebih dari urusan ekonomi tapi urusan hutang sejarah, amanat konstitusi dan pesan Proklamator Republik Indonesia, Bung Karno."

Sukamta menjelaskan bahwa dukungan perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, bahwa 'penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan'.

"Indonesia punya hutang sejarah, Palestina negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia melalui seorang Mufti Palestina, Muhammad Amin Al Husaini. Dukungan Palestina ini menggerakkan negara-negara lain untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Terakhir, Bung Karno berpesan bahwa 'Selama kemerdekaan Bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah Bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel'," terang Sukamta.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

"Kami mengapresiasi sikap konsisten pemerintah Indonesia selama ini, khususnya kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang menyampaikan suasana hati dan perasaan rakyat Indonesia untuk terus mendukung Palestina merdeka dan harapan kami agar Pemerintah RI tidak akan membangun hubungan diplomatik apapun dengan Israel dalam pertemuan dengan Menlu AS, Anthony Blinken"

Lokasi IKN Baru Kebanjiran

PKS: Menunjukkan Kajian AMDAL Wajib Dilakukan Seksama

KUTIPAN

Jakarta (21/12) --- Dua desa dan 1 kelurahan Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur terendam banjir kemarin, Minggu (19/12).

Lokasi tersebut berdekatan dengan lokasi ibukota negara baru yang tengah digarap pemerintah.

Banjir ini menuai polemik di kalangan masyarakat. Pasalnya, pemerintah sebelumnya mengklaim bahwa di lokasi ibukota negara yang baru bebas dari ancaman bencana termasuk banjir.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa adanya banjir di Penajam, menandakan bahwa pemerintah harus serius membahas AMDAL untuk ibukota negara baru.

"Ini kian menunjukkan bahwa kajian AMDAL wajib dilakukan dengan seksama," ucap Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin

(20/12).

Anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan, pemerintah seharusnya tidak perlu terburu-buru mendesak parlemen untuk segera merampungkan RUU IKN. Apalagi di dekat lokasi ibukota baru mengalami kebanjiran.

"Jangan terburu-buru baik pembahasan secara formil apalagi meteril di RUU IKN," imbuhnya.

Pihaknya mendesak pemerintah untuk segera menghentikan wacana pembangunan ibukota negara baru yang memiliki risiko kerugian fiskal negara yang cukup besar.

"PKS tetap menghimbau Pemerintah untuk menghentikan ide membangun IKN," tutupnya.



Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi II DPR RI

"Adanya banjir di Penajam, menandakan bahwa pemerintah harus serius membahas AMDAL untuk ibukota negara baru. Ini kian menunjukkan bahwa kajian AMDAL wajib dilakukan dengan seksama,"

Anggota FPKS: Bagi PKS, RUU Landas Kontinen **Penting** Agar Kedaulatan NKRI Terjaga

KUTIPAN

RUU ini juga disiapkan agar ada kepastian hukum di landas kontinen. "Saat ini pelaksana hukum di wilayah landas kontinen mungkin masih kurang kuat ketika harus melakukan penegakan, maka hadirnya Undang-Undang ini nantinya bisa memperkuat kepastian hukumnya," sebut Anggota Komisi II Aus Hidayat Nur.

Surabaya (20/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur bersama rombongan Panitia Khusus RUU Landas Kontinen melakukan kunjungan kerja ke Pusat Studi Hukum Internasional Universitas Airlangga, Surabaya.

Anggota Fraksi PKS ini menegaskan bahwa partainya sangat serius mengawal RUU Landas Kontinen demi terjaganya kedaulatan NKRI.

"Membangun dan menjaga kedaulatan NKRI di lautan adalah prioritas PKS," tegasnya.

Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini

menjelaskan setidaknya ada empat urgensi RUU Landas Kontinen.

"Kelak Undang-Undang ini akan menjadi dasar hukum penyelesaian batas landas kontinen dengan negara tetangga," ungkapnya.

Selain itu, RUU ini juga disiapkan agar ada kepastian hukum di landas kontinen.

"Saat ini pelaksana hukum di wilayah landas kontinen mungkin masih kurang kuat ketika harus melakukan penegakan, maka hadirnya Undang-Undang ini nantinya bisa memperkuat kepastian

hukumnya," tambah Anggota Komisi II ini.

"Termasuk menjadi penguat dasar hukum bagi klaim di atas 200 mil laut, yang dengan begitu kita mendapatkan hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan eksploitasi SDA-nya," pungkas Kang Aus, begitu sapaan akrabnya.

Rombongan Pansus RUU Landas Kontinen ini disambut oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Iman Prihandono dan Kepala Pusat Studi Hukum Laut Unair.

Banyak masukan dari segenap civitas akademika Unair terhadap RUU ini. Diskusi hangat terkait hukum laut internasional pun berlangsung hingga pertengahan diakhiri menjelang Dzuhur.

**KH. AUS HIDAYAT NUR**

Anggota Komisi II DPR RI

"Membangun dan menjaga kedaulatan NKRI di lautan adalah prioritas PKS. setidaknya ada empat urgensi RUU Landas Kontinen. Kelak Undang-Undang ini akan menjadi dasar hukum penyelesaian batas landas kontinen dengan negara tetangga,"



Legislator PKS: RUU Penyardapan, Bentuk **upaya** mengatasi dan antisipasi terorisme, korupsi, narkoba

KUTIPAN

Jakarta (16/12) – Anggota Legislatif Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyampaikan bahwa Rancangan Undang-undang hadir sebagai bentuk upaya untuk membongkar kejahatan luar biasa yang perlu untuk diantisipasi sekaligus diatasi oleh para penegak hukum. Ia menyampaikan dalam acara PKS Legislative Report pada Kamis (16/12/2021) pagi.

“Meskipun dalam konteks HAM tindakan penyardapan dilarang, akan tetapi RUU Penyardapan harus diatur sedemikian rupa baiknya”, Ujar Nasir Djamil

Berdasarkan Konsep Hak Asasi Manusia maka tindakan penyardapan sangat dilarang dikarenakan melanggar hak privasi seseorang.

“RUU Penyardapan bukan hal yang mudah, sehingga perlu adanya pengawasan, ruang lingkup, waktu penyardapan terse-

but” Ujar Anggota DPR RI Dapil Nanggroe Aceh Darusalam II

Selanjutnya, beliau menyampaikan bahwa RUU Penyardapan tidak diatur secara khusus sehingga perlu adanya menyusun satu undang-undang yang lebih mendalam terkait RUU Penyardapan tersebut.

“Secara umum, RUU Penyardapan dimaksudkan agar ditindaklanjuti dalam keputusan mahkamah konstitusi, dengan

demikian komisi III berupaya untuk menyusun peraturan perundang-undang terkait penyardapan tersebut” Pungkas Nasir

Dengan demikian, RUU Penyardapan saat ini masih dalam proses pembahasan dan pengawasan agar tidak melanggar hak privasi orang, mengingat RUU tersebut bertujuan untuk membongkar kejahatan yang sulit untuk dibongkar.

“Dalam hal ini, PKS juga akan turut serta mengawasi serta turut serta mewarnai pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut” Pungkas Nasir Djamil



H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Komisi III DPR RI

“Meskipun dalam konteks HAM tindakan penyardapan dilarang, akan tetapi RUU Penyardapan harus diatur sedemikian rupa baiknya. “RUU Penyardapan bukan hal yang mudah, sehingga perlu adanya pengawasan, ruang lingkup, waktu penyardapan tersebut”.

Ancaman La Nina Terbukti, Aleg PKS Minta Pemerintah Tahan Kebijakan Berdampak Kerusakan Lingkungan

KUTIPAN

Jakarta (22/12) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, mencermati terjadinya bencana Banjir baik di tanah air Indonesia maupun di negara tetangga seperti di Malaysia yang berlangsung di penghujung Desember 2021 ini,

Akmal mengatakan, La Nina yang merupakan fenomena mendinginnya suhu permukaan air laut (SML) di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya telah menyebabkan peningkatan curah hujan yang terjadi sebulan terakhir.

Negara Indonesia dan sekitarnya, lanjut Akmal, telah merasakan dampaknya yang apabila kondisi daratan tidak mampu menghadapi, maka yang terjadi adalah banjir berkepanjangan. Daratan yang tidak mampu menahan curah hujan akibat La Nina disebabkan oleh keseimbangan lingkungan terganggu akibat ulah manusia.

"Kerusakan lingkungan

berskala besar ini akibat banyak ijin penggunaan kawasan hutan untuk tambang. Ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Untuk beberapa daerah, ada dugaan akibat pembukaan hutan untuk program food estate, tapi ini masih perlu pembuktian dengan evaluasi mendalam. Dan yang jelas bila Pindahan Ibu Kota Negara dipaksakan dengan membuka luasan lahan hutan yang signifikan, dampak kerusakan lingkungan akan semakin parah", tutur Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menjabarkan pada 2020 lalu La Nina memicu curah hujan tinggi dan bahkan pada November 2020 sempat memicu banjir dan longsor

seraya bersamaan di berbagai daerah.

"Selain itu, banjir yang dipicu La Nina juga merusak tanggul menyebabkan air bah melimpas ke permukiman. Baru-baru ini (2021) Penyebab Banjir yang terjadi di Kalimantan Barat tidak lain adalah karena berkurangnya tempat penyerapan air saat debit hujan tinggi, karena sebagian lahan sudah berubah menjadi tambang dan perkebunan sawit," papar Akmal.

Politisi PKS ini meminta kepada pemerintah agar melakukan upaya restorasi ekosistem dan restorasi lingkungan, termasuk melakukan evaluasi terhadap izin tambang dan izin kebun sawit yang tidak memperhatikan tata kelola ekosistem. KLHK mesti menyiapkan langkah-langkah antisipatif akan adanya kemungkinan banjir pada daerah-daerah yang DASnya rusak.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

"Saya meyakini di Indonesia banyak yang melakukan kerusakan lingkungan yang sudah sitemik. Dengan demikian ini menjadi masalah besar yang harus ada solusinya, bagaimana ke depannya Komisi IV akan membuat Panitia Kerja (Panja), guna melihat daerah-daerah di seluruh Indonesia, mana saja yang berpotensi melakukan pelanggaran, dan pelanggaran ini mesti ada perbaikan di masa yang akan datang"



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kreatif Atraktif Substantif



Selamat dan Sukses Ibu Saadiah Uluputty, S.T

Menerima penghargaan dari
Hiapolo Piantropi Indonesia untuk kategori
Politisi inspiratif Peduli Kemanusiaan



Aleg PKS Minta Utamakan Pemenuhan SPM Sebelum Naikan Tarif Tol Tomang-Tangerang-Cikupa

KUTIPAN

Jakarta (27/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menanggapi rencana kenaikan Tarif Jalan Tol Simpang Susun Tomang-Tangerang-Cikupa sebesar Rp.500 pada setiap golongan mulai Minggu (26/12/2021).

Hal itu, menurut Anggota Komisi V itu, sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) No.1527/KPTS/M/2021 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Simpang Susun Tomang-Tangerang Barat-Cikupa.

"Evaluasi dan penyesuaian tarif tol ini dilakukan setiap dua tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi, yaitu inflasi di wilayah Tangerang periode Maret 2019-Agustus 2021 sebesar 4,46 persen," ungkap pria yang akrab disapa SJP.

Namun, kata SJP, sepertinya KepmenPUPR ini hanya memasukkan pengaruh laju inflasi sehingga belum

sesuai dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang resmi disahkan menjadi UU pada Kamis (17/12/2021) lalu.

"Pada Pasal 48 ayat (3) menyebutkan bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif Tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan: a. pengaruh laju inflasi; dan b. evaluasi terhadap pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Jalan Tol," sebut Suryadi.

Mengacu hal tersebut, kata Suryadi, FPKS meminta adanya pemenuhan SPM Jalan Tol tersebut terlebih dulu sebelum adanya kenaikan tarif.

"Pasal 51A ayat (2) UU

tersebut menyebutkan bahwa SPM Jalan Tol tersebut meliputi: a. kondisi Jalan Tol; b. prasarana keselamatan dan keamanan; dan c. prasarana pendukung layanan bagi pengguna Jalan Tol. Dan pada ayat (6) pasal yang sama disebutkan bahwa hasil evaluasi SPM Jalan Tol tersebut merupakan informasi publik," pungkasnya.

Dengan demikian, tambah SJP, FPKS mendorong agar adanya transparansi tentang hasil evaluasi SPM Jalan Tol Simpang Susun Tomang-Tangerang-Cikupa sebelum adanya kenaikan tarif tol tersebut.

"FPKS juga mengingatkan bahwa UU Jalan yang baru disahkan ini sudah seharusnya menjadi tolok ukur baru dalam pelayanan. SPM menjadi klausul baru yang harus dipenuhi dalam perawatan Jalan Tol dan penyesuaian tarif Jalan Tol ke depan," ujar SJP.

Pada Pasal 51A ayat (7), lanjut Suryadi, disebutkan bahwa perlu adanya Peraturan Pemerintah untuk mengatur SPM Jalan Tol lebih lanjut.



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

“FPKS mengingatkan bahwa UU Jalan yang baru disahkan ini sudah seharusnya menjadi tolok ukur baru dalam pelayanan. SPM menjadi klausul baru yang harus dipenuhi dalam perawatan Jalan Tol dan penyesuaian tarif Jalan Tol ke depan,”

Sejauh ini, baru ada Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol berdasarkan UU Jalan yang lama. "Oleh karena itu, FPKS mendesak agar Pemerintah

mengatur dulu SPM Jalan Tol melalui Peraturan Pemerintah sesuai dengan UU Jalan yang baru disahkan tersebut, baru kemudian memutuskan menaikkan tarif Jalan Tol," tutup Anggota DPR asal Dapil NTB ini.

Aleg PKS Dukung Konsep Indonesia Sentris pada Pembangunan Infrastruktur Transportasi

KUTIPAN

Toriq menyebutkan tujuan pembangunan infrastruktur transportasi adalah menciptakan konektivitas antar wilayah yang baik. Sehingga membuat proses mobilitas masyarakat dan diseminasi barang semakin singkat. Dan diharapkan akan tumbuh sentra-sentra ekonomi baru di berbagai bidang.

Tasikmalaya (25/12) — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan telah membangun sejumlah proyek infrastruktur transportasi pada tahun 2021. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat berikan penghargaan sekaligus catatan.

“Apresiasi untuk Kemenhub, dimana pembangunan infrastruktur transportasi pada tahun 2021 berfokus pada konsep Indonesia sentris. Yang artinya tidak hanya berfokus di Jawa, tapi juga seluruh wilayah Indonesia,” ujar Politisi PKS

asal Tasikmalaya.

Toriq menyebutkan tujuan pembangunan infrastruktur transportasi adalah menciptakan konektivitas antar wilayah yang baik. Sehingga membuat proses mobilitas masyarakat dan diseminasi barang semakin singkat. Dan diharapkan akan tumbuh sentra-sentra ekonomi baru di berbagai bidang.

“Namun Saya berharap proyek-proyek infrastruktur transportasi yang dibangun pada tahun 2021 agar benar-benar berfungsi maksimal. Jangan sampai mangkrak

karena tidak didukung oleh pembangunan infrastruktur lain,” pungkasnya.

Senada dengan apa yang disampaikan Presiden RI, Toriq menyoroti kualitas perencanaan program pemerintah yang buruk. Misalnya saja pelabuhan yang mangkrak dan tidak memiliki akses jalan.

“Kasus Pelabuhan Batanjung di Kecamatan Kapuas Kuala, Kalimantan Tengah misalnya. Proyek itu hingga kini belum tersedia akses jalan masuk menuju lokasi. Bangun pelabuhan nggak ada akses jalan ke situ. Ya bagaimana pelabuhan itu bisa digunakan?,” sebutnya.

Oleh karenanya Toriq meminta agar setiap proyek infrastruktur harus diawali dengan kajian yang mendalam. Didesain dengan presisi serta pembentukan kolaborasi yang kuat antar lembaga dan pemerintah daerah yang beririsan dengan proyek.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi V DPR RI

“Saya berharap proyek-proyek infrastruktur transportasi yang dibangun pada tahun 2021 agar benar-benar berfungsi maksimal. Jangan sampai mangkrak karena tidak didukung oleh pembangunan infrastruktur lain”

Legislator PKS Desak Pemerintah Dengar Aspirasi Kades untuk Revisi Perpres 104 Tahun 2021

KUTIPAN

Jakarta (18/12) --- Massa Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta, (16/02/2021). Mereka menuntut revisi Perpres 104 tahun 2021.

Apdesi mendesak Pemerintah untuk merevisi perpres tersebut, khususnya Pasal 5 ayat 4 tentang rincian APBN Tahun 2022 yang mengatur penggunaan Dana Desa.

"Pemerintah harus mendengar dan mengajak para perangkat desa untuk temukan solusi terbaiknya", kata Anggota DPR RI Komisi V, Hamid Noor Yasin.

Hamid menambahkan, ketentuan pengaturan peruntukan Bantuan Langsung Tunai dipatok minimal 40% Dana Desa ini yang membuat Perangkat Desa, khususnya Kepala Desa kesulitan untuk mengalokasikan dana desa secara merata dan berkeadilan di desanya karena jumlah Keluarga Penerima Manfaat

(KPM) jumlahnya yang tidak terlalu banyak, sedangkan kebutuhan pembangunan lebih diutamakan.

"Hal ini dapat melanggar ketentuan pada UU No. 6 Tahun 2004 tentang Desa, pada Pasal 72 ayat 2 yakni Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan", tegas Hamid Anggota DPR RI dari Dapil Jateng IV.

Hamid menambahkan sebenarnya Pemerintah sudah pada jalur yang tepat memberikan prioritas tahun 2021 ini kepada pemulihan ekonomi dengan revitalisasi

BUMDES.

"Selain itu, pengembangan ekonomi mikro produktif, dan bantuan langsung tunai yang dipatok Rp 300.000 untuk PMK, bukan dipatok persentase 40% langsung dari Alokasi Dana Desanya", kata Hamid yang bermitra dengan Kementerian Desa ini.

Pihaknya, kata Hamid, akan mendiskusikan dengan Menteri terkait, untuk menemukan formulasi yang tepat pada Rapat Kerja di Persidangan berikutnya secara intensif.

"Kita berharap Dana Desa yang sudah turun 4 Triliun dari tahun 2021 malah semakin tidak efektif dengan pengaturan seperti ini", tutup Hamid



Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.

Anggota Komisi V DPR RI

"Ketentuan pengaturan peruntukan Bantuan Langsung Tunai dipatok minimal 40% Dana Desa ini yang membuat Perangkat Desa, khususnya Kepala Desa kesulitan untuk mengalokasikan dana desa secara merata dan berkeadilan di desanya karena jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) jumlahnya yang tidak terlalu banyak, sedangkan kebutuhan pembangunan lebih diutamakan. "

Legislator PKS Minta Pemerintah Revisi Perpres Rincian APBN 2022 Terkait Dana Desa

KUTIPAN

Jakarta (17/12) — Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 104 tahun 2021 tentang rincian APBN 2022 yang ditandatangani Presiden akhir November lalu.

Pada Pasal 5 ayat (4) disebutkan bahwa Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40 persen dan dukungan pendanaan penanganan Covid-19 paling sedikit 8 persen.

Padahal Dana Desa mengalami penurunan menjadi Rp 68 Triliun pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp 72 Triliun pada tahun 2021.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Ma'azat meminta, pemerintah untuk merevisi Peraturan ini.

"Pemerintah mengubah sistem pemberian Bantuan

Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa, dari yang sebelumnya diberikan Rp 300.000 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sekarang sistemnya dipatok 40% dari Dana Desa," kata Syahrul dalam keterangan yang diterima, Minggu (12/12/2021).

"Ini dapat dilihat pada sesuai Pasal 5 ayat 4 poin a. Sistem ini membuat ketidakadilan. Akan dijumpai desa yang sedikit jumlah KPM, tetapi alokasinya sangat besar atau sebaliknya Desa yang KPM-nya banyak, tetapi karena terikat 40%, KPM tidak mendapat sebanyak tahun

2021 ini (Rp 300.000)," lanjutnya.

"Di samping itu, tren penurunan angka Covid-19 dapat dijadikan tolak ukur sampai kapan bantuan ini dan modifikasi bantuan sosial kepada KPM agar menggerakkan mereka menjadi lebih produktif dan berkelanjutan. Sehingga juga dapat ditinjau kembali sistem pengaturan persentase 8% untuk penanganan Covid-19, padahal ada desa yang sudah hijau beberapa bulan terakhir dan sebaliknya ada desa yang masih berjuang warga desanya dalam Covid-19," imbuhnya.

Syahrul mengingatkan kewenangan Desa dalam mengelola desanya jangan sampai dikeбири oleh pemerintah pusat.

"Pemerintah dapat melakukan pengawasan intensif atas penyaluran bantuan, bukan malah mengubah sistem untuk keefektifan dalam pemulihan ekonomi," ujarnya.

Syahrul menjelaskan, penurunan dana desa tahun 2022 yakni senilai Rp 68 triliun dari sebelumnya sampai Rp 72 triliun, harus benar-benar dialokasikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

"Membangun desa dengan padat karya, mengokohkan BUMDesa yang menjadi ujung tombak peningkatan kesejahteraan desa agar menjadi prioritas yang terus dimaksimalkan oleh pemerintah," pungkasnya



**Dr. H. SYAHRUL
AIDI MAAZAT, Lc., M.A.**
Anggota Komisi V DPR RI

"Tren penurunan angka Covid-19 dapat dijadikan tolak ukur sampai kapan bantuan ini dan modifikasi bantuan sosial kepada KPM agar menggerakkan mereka menjadi lebih produktif dan berkelanjutan.

Sehingga juga dapat ditinjau kembali sistem pengaturan persentase 8% untuk penanganan Covid-19, padahal ada desa yang sudah hijau beberapa bulan terakhir dan sebaliknya ada desa yang masih berjuang warga desanya dalam Covid-19"



Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan

Raker dengan Kemendag, Aleg PKS Minta Ada Mekanisme Konsistensi Harga Minyak Goreng

KUTIPAN

Jakarta (16/12) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina pada rapat kerja dengan kementerian perdagangan meminta agar ada konsistensi harga minyak goreng yang merupakan komoditas kebutuhan pokok.

Kondisi harga minyak goreng yang biasanya perliter antara 11 ribu rupiah hingga 15 ribu rupiah per kilogram, kata Nevi, jangan sampai melonjak lagi hingga sampai Rp. 25.000,- per Kg.

"Permintaan rakyat sangat sederhana, yakni agar ada HET minyak goreng yang menggunakan harga wajar dan terjangkau. Pemerintah mesti menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara negara yang mampu melindungi kebutuhan rakyatnya. Setelah ditetapkan HET, Harga minyak goreng yang melambung tinggi tidak boleh terjadi lagi. Pemerintah mesti mampu menjamin stabilisasi harga minyak goreng ini", tutur Nevi.

Politisi PKS ini memaparkan, situasi harga

minyak goreng beberapa waktu lalu di masyarakat telah menjadi bandul yang tidak seimbang antara situasi yang dihadapi produsen dan situasi yang di hadapi konsumen.

Produsen minyak goreng di tanah air sangat diuntungkan dengan situasi harga yang sangat tinggi. Namun demikian, rakyat Indonesia yang besar jumlahnya begitu sangat dirugikan dengan situasi harga yang ada mengingat minyak goreng ini merupakan kebutuhan pangan pokok yang di konsumsi setiap harinya.

"Agar harga minyak goreng ini stabil dan terjangkau di masyarakat, pemerintah harus terus hadir menjaga kondisi ini. Selama ini produsen minyak

goreng sudah mendapat segala kemudahan dan keuntungan dari dukungan dan aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Kini saatnya para produsen minyak goreng memberikan baktinya untuk memberikan kontribusinya menyediakan minyak goreng dengan harga yang wajar di pasaran dalam negeri. Jangan semua komoditas di ekspor demi memburu keuntungan sebesar-besarnya dengan secara bersamaan tidak menghiraukan kebutuhan masyarakat Indonesia", kritis Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini meyakinkan kepada pemerintah, bahwa kejadian tingginya harga minyak goreng memberikan dampak signifikan pada masyarakat kecil terutama para pedagang makanan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berupa aturan yang berpihak pada rakyat banyak mesti terus dilakukan, bukan hanya pada pengusaha kelapa sawit, tetapi kepada seluruh konsumen masyarakat Indonesia. Harga minyak goreng wajar pada angka 11 ribu rupiah merupakan harga yang



Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

"Saya meminta, Pemerintah menjamin stabilisasi harga minyak goreng yang wajar dan terjangkau sehingga rakyat Indonesia sudah tidak berhadapan lagi dengan situasi mahalnyanya minyak Goreng"

sesuai dengan kemampuan beli rakyat Indonesia dan secara keekonomian para produsen masih dapat untung yang wajar, sehingga mesti dapat dijadikan pertimbangan HET untuk beberapa waktu kedepan.

"Saya meminta, Pemerintah menjamin stabilisasi harga minyak goreng yang wajar dan

terjangkau sehingga rakyat Indonesia sudah tidak berhadapan lagi dengan situasi mahalnyanya minyak Goreng. Kehadiran pemerintah mesti dapat dirasakan masyarakat dengan pengendalian harga minyak goreng yang merupakan kebutuhan konsumsi sehari-hari", tutup Nevi Zuairina.

Legislator PKS Ingatkan Efek Domino Kenaikan Harga Elpiji

KUTIPAN

Surabaya (27/12) -- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menyayangkan langkah pemerintah yang menaikkan harga gas elpiji disaat kondisi ekonomi masyarakat belum pulih akibat pandemi.

Amin mengaku heran dengan pemerintah yang enggan mencari solusi lain diluar menaikkan harga.

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga LPG di akhir tahun 2021 ini. Harga LPG non subsidi saat ini menjadi Rp 11.500 per kg per Senin (27/12/2021) ini. Amin mengingatkan, kenaikan harga jual gas tabung 12 Kg akan juga diikuti dengan naiknya harga-harga barang kebutuhan lainnya.

"Karena tidak sedikit pelaku usaha kecil dan menengah yang mempergunakan gas 12 Kg.

Agar usahanya bertahan, sudah pasti biaya produksi akan naik sehingga pada akhirnya menaikkan barang-barang kebutuhan masyarakat. Sehingga pada akhirnya

kelompok masyarakat miskin akan terdampak kenaikan harga-harga barang," ujar Amin. Dalam jangka pendek, imbuh Amin, masyarakat kecil harus berjibaku menghadapi peningkatan biaya rumah tangga akibat kenaikan harga elpiji.

Apalagi, jika standar kemiskinan mengacu pada standar internasional labour organization (ILO) sebesar US \$2 per kapita per hari, maka akan banyak kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tidak memperoleh subsidi, kembali terpukul secara ekonomi.

"Kelompok menengah ke bawah selama ini kan tidak memperoleh subsidi, mereka harus mengeluarkan biaya kebutuhan rumah yang lebih besar. Apalagi Badan Pusat

Statistik (BPS) menyebut, konsumsi energi merupakan salah satu pengeluaran terbesar dalam anggaran rumah tangga masyarakat golongan menengah bawah," ujarnya.

Langkah pemerintah tersebut, kata Amin, bisa menjadi blunder terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang baru saja membaik.

Seperti dilansir BPS, konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang paling penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi saat ini.

"Dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dibentuk oleh sejumlah komponen antara lain penjualan eceran untuk komoditas makanan dan minuman," ujarnya.

Amin juga mengingatkan, efek domino kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat tidak hanya pada bidang ekonomi, namun juga berdampak negatif pada kondisi sosial dan keamanan.

"Sebagian besar masyarakat menjadi makin skeptis terhadap keberpihakan pemerintah pada rakyat," ungkap Amin mengakhiri.



AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

"Kelompok menengah ke bawah selama ini kan tidak memperoleh subsidi, mereka harus mengeluarkan biaya kebutuhan rumah yang lebih besar. Apalagi Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, konsumsi energi merupakan salah satu pengeluaran terbesar dalam anggaran rumah tangga masyarakat golongan menengah bawah"



Mengacu data Kementerian Keuangan sebagian besar BUMN dan lembaga pemerintah berisiko bangkrut meski sudah berkali-kali menerima PMN. Hal ini ditunjukkan oleh Altman Z-Score yang menunjukkan bahwa 68 persen BUMN berada dalam kondisi tertekan, dan hanya 32% yang kondisinya aman.

BUMN Berkali-kali Terancam Bangkrut **Tetap** diberi PNM



55 persen BUMN penerima PMN bahkan memiliki rasio utang terhadap ekuitas melebihi rata-rata industri. Sementara, yang sebanding dengan industrinya hanya 2%. Lalu, utang yang berada di bawah rata-rata industrinya tercatat sebanyak 34%

**AMIN.
AK., MM.**

Anggota Komisi VI DPR



Aleg PKS: Klaim Pertamina Terkait Penggunaan BBM Premium Menurun Menyesatkan

KUTIPAN

Jakarta (24/12) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto meminta Pemerintah dan Pertamina berhenti bernarasi akan menghapus BBM jenis premium karena penggunaannya terus turun.

Mulyanto menilai narasi itu menyesatkan dan berpotensi masuk kategori kebohongan publik. Karena faktanya hingga kini masih banyak masyarakat yang ingin menggunakan bensin premium.

"Kalaupun penggunaan premium berkurang, hal itu disebabkan karena pihak Pertamina yang mengurangi jumlah pasokan BBM premium di beberapa wilayah. Bukan karena peminatnya yang berkurang. Kalau mau jujur silakan buka data jumlah distribusi BBM Premium ke berbagai wilayah. Kita lihat sama-sama apakah benar penurunan konsumsi BBM premium itu karena turunnya minat masyarakat," tegas Mulyanto.

Mulyanto menyayangkan Pemerintah dan Pertamina tidak jujur soal penghapusan BBM premium ini.

Mulyanto menegaskan, dirinya bukan anti pada BBM ramah lingkungan, namun kita tetap harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

Dia minta Pemerintah memikirkan solusi alternatif BBM murah bagi masyarakat bila tetap ingin menghapus Premium. Sehingga upaya menjaga lingkungan hidup tercapai namun beban hidup masyarakat tidak bertambah.

Anggota Komisi VII DPR RI itu mengingatkan, saat ini daya beli masyarakat sedang lemah karena terdampak pandemi Covid-19. Tahun 2022 belum tentu terjadi pemulihan daya

beli masyarakat tersebut.

"Pemerintah harus memiliki rencana buffering dan mitigasinya. Kalau Premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat?" kata Mulyanto.

Mulyanto pun mempertanyakan, apakah kompensasi atas pengurangan Pertamina untuk Premium ini dapat dialihkan ke BBM yang tersisa, sehingga harganya menjadi sama dengan harga premium?

"Kalau itu yang dilakukan, saya yakin tidak ada penentangan dari masyarakat," sambungnya.

Mulyanto mengingatkan, Pemerintah untuk mengkaji ulang rencana penghapusan tersebut.

"Jadi, betul-betul harus dikaji terkait kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini. Apakah, sudah tepat waktunya menghapus Premium tersebut?" tandas Mulyanto.

**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Komisi VII DPR RI

"Kalaupun penggunaan premium berkurang, hal itu disebabkan karena pihak Pertamina yang mengurangi jumlah pasokan BBM premium di beberapa wilayah. Bukan karena peminatnya yang berkurang. Kalau mau jujur silakan buka data jumlah distribusi BBM Premium ke berbagai wilayah. Kita lihat sama-sama apakah benar penurunan konsumsi BBM premium itu karena turunnya minat masyarakat,

Legislator PKS Soroti Terbitnya Perpres terkait Posisi Wamensos

KUTIPAN

Jakarta (27/12) --- Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menyoroti terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial. Dimana, pada Pasal 2 Ayat 1, menyebutkan bahwa Presiden dapat menunjuk adanya wakil menteri untuk membantu kinerja Menteri Sosial.

Menurut Iskan, penambahan posisi tersebut dalam berakibat pada penambahan anggaran yang tidak diperlukan, karena Kementerian Sosial sudah memiliki struktur yang baku hingga di level daerah.

"Kemensos itu kan sifatnya pelayanan ya. Sudah terstruktur, di daerah ada dinas sosial baik di level provinsi hingga kabupaten/kota. Jadi, kalau ada posisi Wamensos, dikhawatirkan malah tidak fokus karena ada dua matahari," jelas Iskan saat dihubungi Parlemenaria, Jumat (24/12/2021).

Menurut Anggota Fraksi PKS ini, jika posisi Menteri

Sosial berhalangan, secara politik, Presiden RI dapat menunjuk adanya Menteri Ad-interim atau bisa langsung diambil alih oleh Menteri Koordinator di atasnya.

"Jadi, menurut saya (posisi Wamensos) itu pemborosan anggaran, sehingga manajerial tidak efektif," tambah Iskan.

Di sisi lain, Iskan menambahkan, dalam tiap kali rapat kerja di DPR, seringkali keputusan yang diambil oleh Wamen itu tidak dapat diterima oleh DPR, karena Wamen tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan kebijakan strategis, misalnya terkait dengan anggaran.

"Bahkan, sudah ada para Dirjen Eselon I yang dikordinasikan," urainya.

Termasuk, disaat terjadi bencana seperti ini, kebijakan strategis tetap diambil alih oleh menteri, lalu dikordinasikan penanganan bencananya di daerah melalui dinas sosial terkait.

"Sederhana sekali. tetap saja menurut saya (wamensos) tidak efisien, karena yang tanggung jawab adalah menteri," tutup Iskan.

Diketahui, Presiden Jokowi per 14 Desember 2021, telah resmi menetapkan Perpres Nomor 110 Tahun 2021 yang telah pula diundangkan oleh Menkumham Yasonna Laoly Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 270.

Dalam perpres berjumlah 41 Pasal ini memuat aturan mengenai Wakil Menteri Sosial yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, namun berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial.



H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Dapil Sumatera Utara II

"Jika posisi Menteri Sosial berhalangan, secara politik, Presiden RI dapat menunjuk adanya Menteri Ad-interim atau bisa langsung diambil alih oleh Menteri Koordinator di atasnya. Jadi, menurut saya (posisi Wamensos) itu pemborosan anggaran, sehingga manajerial tidak efektif"

HNW Desak Solusi Berkeadilan Terkait Pelayanan Karantina PMI bagi WNI dari Luar Negeri

KUTIPAN

Jakarta (22/12) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid prihatin dengan terjadinya masalah pelayanan karantina bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri,

apalagi bagi PMI yang sering disebut sebagai Pahlawan Devisa, sementara ada pihak-pihak yang justru seperti mendapatkan fasilitas untuk tidak harus dikarantinakan, sementara mereka juga potensial membawa virus covid-19 varian Omicron.

HNW sapaan akrabnya menjelaskan, banyak keluhan dari warga yang menilai Pemerintah tidak berlaku adil dan tidak siap dalam melaksanakan teknis pengantaraan bagi warga dari Luar Negeri yang akan masuk ke Indonesia.

Hal yang terakhir itu, imbuhnya, menyebabkan timbulnya antrean panjang dan lama dengan masa tunggu 8-9 jam di Bandara hingga bisa

masuk ke fasilitas karantina yang disediakan oleh Pemerintah. Termasuk kasus terbaru yang menjadi perhatian publik di mana banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang ke tanah air harus terlantar sampai 15 jam di Bandara Soetta, Tangerang, sebelum akhirnya bisa ditempatkan di lokasi karantina (18/12/2021).

“Saya sepakat bahwa diperlukan kehati-hatian ekstra untuk mencegah terjadinya penyebaran pandemi covid-19 khususnya varian omicron, yang bisa berasal dari siapa pun yang masuk ke Indonesia, sehingga diperlukan karantina. Namun kebijakan karantina dari luar negeri tersebut harus diberlakukan dengan

manusiawi dan adil, dan dikaji secara lebih operasional,” ujar Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/12/2021).

HNW mengaku sulit membayangkan, misalnya, operasionalisasi rencana Pemerintah agar PMI bukan hanya turun di Bandara Soetta, melainkan juga di Bandara Juanda, karena penerbangan internasional yang membawa PMI pada umumnya mendarat di Soetta dan bukan di Juanda.

“Sehingga yang diperlukan adalah persiapan yang lebih baik, petugas yang lebih terampil, dan tempat-tempat untuk karantina yang lebih banyak di sekitar Bandara Soetta (Jakarta). Perlu juga pendekatan keadilan, untuk WNI yang kembali ke Indonesia setelah bisnis atau pelepasan tentu wajar bila dikenakan karantina berbayar, tapi bagi WNI yang pulang ke Indonesia sebagai PMI, Pelajar/Mahasiswa yang akan banyak pulang ke Indonesia pada akhir Tahun, Utusan Negara untuk olahraga,

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

“Agar Negara tidak membiarkan terjadinya mafia perhotelan untuk pemberlakuan karantina yang sangat memberatkan para Warga Indonesia sepulang mereka dari LN.

Kepastian hadirnya Negara dalam melindungi warganya juga sangat diperlukan agar tidak meresahkan dan membingungkan WNI yang akan pulang ke Indonesia, lantaran terjadinya kebijakan karantina yang bisa berubah tiba-tiba tanpa penjelasan yang memadai”

Dugaan Mafia Karantina Mencuat

Aleg PKS: Berantas dari Akar hingga Pucuk!

KUTIPAN

Jakarta (20/12) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mendesak Pemerintah mengevaluasi kebijakan karantina selama ini.

Desakan ini muncul, terkait mencuatnya dugaan mafia karantina hotel yang mengorbankan Warga Negara Indonesia (WNI) pelaku perjalanan Internasional.

Sebelumnya, Bukhori menerima laporan adanya tindakan penentuan hotel tertentu yang dilakukan sepihak oleh oknum petugas di bandara kepada pelaku perjalanan internasional setibanya mereka di bandara.

Anggota Komisi Kebenaran ini meminta manajemen kebijakan karantina oleh Satgas Covid-19 dilakukan secara transparan.

Bukhori juga mendorong kebijakan isolasi terpusat (isoter) atau karantina di hotel tidak dikonsentrasikan di hotel tertentu demi menghindari tuduhan adanya "main mata" antara petugas satgas dan pelaku bisnis.

"Jangan hanya hotel dengan peringkat tertentu saja,

misalnya hotel bintang tertentu. Kami memandang yang benar-benar diperlukan adalah ketersediaan fasilitas isolasi yang memadai dan kemudahan bagi pendatang internasional untuk mengakses karantina yang sesuai dengan kemampuan budget. Kami mendukung karantina sebagai suatu aturan wajib ditegakkan, akan tetapi jangan ada upaya memeras, tipu daya, maupun penetapan secara sepihak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menodai kebijakan penanganan pandemi," tukasnya.

Politisi PKS ini menegaskan, tidak semua WNI yang tiba dari luar negeri memiliki kemampuan finansial yang memadai. Memaksa WNI, khususnya yang berkemampuan ekonomi lemah, untuk mengambil paket karantina yang terlanjur dipatok dengan harga tinggi adalah tindakan yang tidak manusiawi. Alih-alih memperoleh simpati

dari masyarakat, kebijakan mitigasi risiko ini justru akan mendulang kecaman, tidak hanya dari WNI, tetapi juga dari WNA sehingga menimbulkan citra buruk di mata internasional.

Berkenaan dengan hal itu, demikian Bukhori melanjutkan, Komisi VIII DPR RI sebenarnya telah mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku unsur Satgas Covid-19 untuk membesarkan praktik mafia karantina tersebut saat Rapat Kerja yang lalu, Senin (13/12/2021).

"Kami meminta BNPB selaku unsur strategis dalam Satgas Covid-19 untuk segera menindaklanjuti dugaan ini. Segera lakukan evaluasi dan koreksi secara menyeluruh terhadap temuan yang dinilai menyimpang. Jika benar terbukti, praktik mafia karantina ini mesti segera diberantas dari akar hingga pucuknya!," tegas Bukhori.

Selain itu, Legislator Dapil Jawa Tengah 1 ini meminta BNPB menjelaskan secara wajar dan terbuka harga semua hotel yang telah ditetapkan untuk menjadi tempat karantina. "Jangan sampai orang itu



KH. BUKHORI, Lc., M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Kami meminta BNPB selaku unsur strategis dalam Satgas Covid-19 untuk segera menindaklanjuti dugaan ini. Segera lakukan evaluasi dan koreksi secara menyeluruh terhadap temuan yang dinilai menyimpang. Jika benar terbukti, praktik mafia karantina ini mesti segera diberantas dari akar hingga pucuknya!,"

hanya dikebir atau lainnya membeli kucing dalam karung. Itu tidak tepat dan tidak wajar. Dalam situasi mencekam seperti ini yang berdampak keras akibat

pandemi itu rakyat, bukan hanya pengusaha saja," kritiknya.
Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aleg PKS: Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Harus Komprehensif

KUTIPAN

Mufida menegaskan, PKS tidak menginginkan adanya kekosongan aturan jika kekerasan seksual diatur sementara kasus penyimpangan seksual dan seks bebas juga turut diatur sebab sudah terbukti menyebabkan kerugian.

Jakarta (24/12) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menegaskan sikap Fraksi PKS tegas menolak seluruh tindakan kejahatan seksual dan diberikan hukuman seberat-beratnya.

Bukan hanya kejahatan seksual, kasus kesuisilaan termasuk penyimpangan seksual dan seks bebas juga harus dicegah. Hal ini diungkapkan Mufida dalam Dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV belum lama ini.

Mufida menegaskan, PKS tidak menginginkan adanya kekosongan aturan jika kekerasan seksual diatur sementara kasus penyimpangan seksual dan

seks bebas juga turut diatur sebab sudah terbukti menyebabkan kerugian.

"Sepanjang tidak didahului dengan pengesahan larangan perzinahan dan penyimpangan yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku dalam hal ini RKUHP maka RUU TPKS harus disempurnakan," ungkap dia.

PKS, papar dia, telah nyata melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual dengan membentuk Rumah Keluarga Indonesia (RKI) sejak 2016. Konsultan RKI telah melakukan pendampingan bukan hanya korban kekerasan tapi juga kejahatan seksual lainnya termasuk penyimpangan.

"Korban bukan hanya muncul dari korban kekerasan seksual juga muncul dari penyimpangan seksual, kehamilan yang tidak dikehendaki karena seks bebas, penyebaran HIV dan sebagainya. Data KPAI sudah menunjukkan banyak remaja kita melakukan hubungan seks bebas dan banyak yang hamil tanpa dikehendaki. Mereka juga korban yang harus dilindungi secara komprehensif," papar Mufida.



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Korban bukan hanya muncul dari korban kekerasan seksual juga muncul dari penyimpangan seksual, kehamilan yang tidak dikehendaki karena seks bebas, penyebaran HIV dan sebagainya. Data KPAI sudah menunjukkan banyak remaja kita melakukan hubungan seks bebas dan banyak yang hamil tanpa dikehendaki. Mereka juga korban yang harus dilindungi secara komprehensif

Penumpukan PMI di Bandara, Aleg PKS: Harusnya Mereka Diprioritaskan

KUTIPAN

Menurut Netty, alternatif tempat karantina gratis di Wisma Atlet atau di fasilitas lainnya harus tetap memerhatikan prosedur standar. "Jangan sampai karena gratis, fasilitas seadanya, tidak memenuhi standar prokes. Nanti malah bisa jadi kluster karantina," ujar Netty.

Jakarta (24/12) -- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani menyayangkan terjadinya penumpukan PMI di Bandara Sukarno-Hatta yang videonya viral.

"Kenapa sampai terjadi penumpukan dan kerumunan seperti itu? Seharusnya otoritas bandara sudah mengantisipasi dengan menyiapkan teknis yang efektif dan efisien. Dengan begitu, proses antrian karantina tidak menyulitkan para pekerja migran yang ingin segera pulang dan berkumpul dengan keluarga," ujar Netty dalam keterangan tertulis, Kamis (23/12/2021).

Selain soal penumpukan

antrian yang memakan waktu berjam-jam, Netty juga mempertanyakan kesiapan tempat wisma karantina gratis untuk para pekerja migran.

"Sesuai aturan, para pekerja migran mendapatkan fasilitas karantina gratis dari negara. Mereka adalah para pahlawan devisa yang seharusnya mendapatkan perhatian dan prioritas dari pemerintah," ungkapnya.

Menurut Netty, alternatif tempat karantina gratis di Wisma Atlet atau di fasilitas lainnya harus tetap memerhatikan prosedur standar.

"Jangan sampai karena

gratis, fasilitas seadanya, tidak memenuhi standar prokes. Nanti malah bisa jadi kluster karantina," ujar Netty.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar membuat kebijakan penetapan batas maksimal biaya karantina di hotel dengan harga terjangkau.

"Pembatasan perlu dilakukan agar masyarakat tidak merasa terbebani untuk karantina mandiri di hotel. Mereka yang bepergian ke luar negeri kan tidak semua untuk tujuan jalan-jalan. Ada yang karena tugas atau menjenguk kerabat. Jadi, jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan kewajiban karantina ini untuk kepentingan bisnis semata," kata Netty.

Netty berharap, dengan biaya karantina yang wajar, masyarakat akan taat menjalani karantina dan tidak melakukan kecurangan agar lolos dari kewajiban tersebut.



Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

"Pembatasan perlu dilakukan agar masyarakat tidak merasa terbebani untuk karantina mandiri di hotel. Mereka yang bepergian ke luar negeri kan tidak semua untuk tujuan jalan-jalan. Ada yang karena tugas atau menjenguk kerabat. Jadi, jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan kewajiban karantina ini untuk kepentingan bisnis semata,"



Politisi PKS Minta Pemerintah **Membuat** Kebijakan yang **Serius** dalam Mencegah **Omicron**

KUTIPAN

Menurut Alifudin yang Juga Ketua BPW Kalimantan DPP PKS, pembuktian dari setiap kasus harus memakai pendekatan ilmu pengetahuan kesehatan, bukan ekonomi atau yang lain, apalagi soal pemerintah dalam mengambil kebijakan yang labil, itu juga harus memakai pendekatan sains

Jakarta (17/12) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, meminta pemerintah membuat kebijakan khusus terkait masuknya omicron ke Indonesia, dan menjadikan pelajaran bersama tentang pendeteksian dini di setiap kedatangan dari luar negeri "Pemerintah harus membuat kebijakan khusus yang lebih ketat WNA atau WNI yang keluar masuk dari luar negeri dan membuat kebijakan secara keilmuan kesehatan agar masyarakat lebih tenang."

Tulis Alifudin dalam keterangannya, Kamis (16/12/2021).

Alifudin pun menambahkan bahwa, kasus ini akan menjadi dugaan masyarakat, bahwa mafia karantina itu dimungkinkan ada, dan itu harus segera di tindak tegas.

"Pasien yang terdeteksi virus omicron di Wisma Atlet, agar Pemerintah membentuk tim khusus mencari alur penyebabnya dari mana virus ini bisa masuk ke Indonesia."

Tambah Alifudin

Menurut Alifudin yang Juga Ketua BPW Kalimantan DPP PKS, pembuktian dari setiap kasus harus memakai pendekatan ilmu pengetahuan kesehatan, bukan ekonomi atau yang lain, apalagi soal pemerintah dalam mengambil kebijakan yang labil, itu juga harus memakai pendekatan sains

"Diharapkan Pemerintah agar mempercepat daerah yang belum memenuhi target vaksin, bahkan masyarakat yang belum vaksin pertama, segerakan dibuka tempat-tempat atau fasilitas kesehatan di daerah untuk vaksin, agar memudahkan masyarakat untuk mengikuti vaksin tahap pertama dan kedua." Tegas Alif "Terakhir pesan saya, masyarakat tetap tenang tapi tetap waspada, apalagi yang sudah melakukan vaksin, tetap jaga protokol kesehatan dimana pun aktivitas kita berada." Tutur Alifudin



H. ALIFUDIN, S.E.,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

"Diharapkan Pemerintah agar mempercepat daerah yang belum memenuhi target vaksin, bahkan masyarakat yang belum vaksin pertama, segerakan dibuka tempat-tempat atau fasilitas kesehatan di daerah untuk vaksin, agar memudahkan masyarakat untuk mengikuti vaksin tahap pertama dan kedua."

Aleg PKS Siap Kawal Rekrutmen P3K demi Kejelasan Status dan Kesejahteraan Guru

KUTIPAN

Jakarta (16/12) — Anggota Legislatif Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menyampaikan bahwa saat ini sudah ada tindak lanjut dengan kementerian terkait dengan Rekrutmen P3K yang bertujuan untuk memberikan kejelasan status pada guru agar memperoleh kesejahteraan dan jaminan sosial dimasa tua.

“Berdasarkan data yang ada sebanyak 524.000 yang sudah terdaftar dan sebanyak 173.000 yang diterima dalam tahap 1 dan saat ini rekrutmen P3K dalam proses Tahap 2” Ujar Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah IX

Seperti yang telah diketahui bahwa dalam Komisi IX terdapat 4 Mitra yang terdiri dari Kemendikbudristek, Kememparekrif, Kemempora, serta Perpustakaan Nasional.

“Di komisi IX juga membahas terkait dengan upaya untuk meningkatkan perekonomian dalam sektor pariwisata, mengingat dampak

dari pandemic COVID-19 menjadikan penurunan angka dari pelaku ekonomi wisata” Ungkap Abdul Fikri Faqih

Komisi IX dan Kememparekrif juga mendorong adanya wisata desa yang diharapkan dapat menjadi salah satu jalan alternative untuk meningkatkan pelaku wisata ekonomi kreatif yang mengalami penurunan.

“Beralih dengan mitra selanjutnya yaitu Kemempora, maka saat ini kita menjalani pengawasan legislasi terkait dengan Revisi UU no 3 Tahun 2005 terkait Keolahraan yang hamper rampung” Ujar Abdul

Fikri Faqih

Selanjutnya Ia menyampaikan terkait dengan pentingnya peranan perpustakaan nasional guna mendorong dan membuka wawasan dalam menangani segala problematika bangsa.

“Hadirnya Taman Bacaan ditengah masyarakat menjadi sarana agar segala problematika yang ada dapat diatasi, sebab masalah bukan dihindari akan tetapi diatasi” Pungkas Abdul Fikri Faqih.



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

“Saat ini sudah ada tindak lanjut dengan kementerian terkait dengan Rekrutmen P3K yang bertujuan untuk memberikan kejelasan status pada guru agar memperoleh kesejahteraan dan jaminan sosial dimasa tua. Berdasarkan data yang ada sebanyak 524.000 yang sudah terdaftar dan sebanyak 173.000 yang diterima dalam tahap 1 dan saat ini rekrutmen P3K dalam proses Tahap 2”

Terkait Kasus Guru Perkosa Santriwati,

Aleg PKS: Perbuatan Keji Harus Dihukum Paling Berat

KUTIPAN

Palu (16/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Sakinah Aljufri menyoroti perbuatan keji yang dilakukan Herry Wirawan yang diduga memperkosa belasan santriwati di Jawa Barat menuai kecaman dari berbagai pihak.

Sakinah mengatakan pelaku harus dihukum dengan berat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Perbuatan Herry Wirawan ini perbuatan keji yang kelewat batas. Para korban nya masih muda, mempunyai masa depan yang masih panjang. Mereka mempunyai segudang mimpi dan cita-cita di masa depan, tapi pupus seketika," ungkap Sakinah di Jakarta, (15/12/2021).

"Usut tuntas perbuatannya, selain perbuatannya keji dan bejat juga sangatlah tidak manusiawi. Perbuatan kejinya menodai dan mencemarkan nama baik lembaga pendidikan. Padahal tujuan pendidikan adalah untuk menanamkan

spiritualitas keagamaan dan pendidikan akhlak mulia peserta didik bukan justru merusak nya dengan perbuatan keji," tambah Sakinah.

Legislator perempuan Partai Keadilan Sejahtera asal Sulawesi Tengah ini mengungkapkan bahwa tindak pidananya ini dilakukan oleh seorang pendidik, dan korban dari perbuatan keji ini lebih dari satu orang.

"Jika merujuk pada UU nomor 17 Tahun 2016 maka pelaku dapat dipidana mati atau dapat dipidana seumur hidup atau minimal pidana penjara paling singkat sepuluh tahun. Agar menimbulkan efek jera bagi orang lain, maka seharusnya dihukum seberat-

beratnya," ujar Sakinah.

Sekretaris Jendral Wanita Islam Alkhairaat (WIA) Pusat ini juga mengingatkan bahwa anak-anak atau peserta didik berhak mendapatkan perlindungan kejahatan seksual yang dilakukan oleh oknum pendidik, tenaga kependidikan atau bahkan dilakukan oleh sesama peserta didik.

"Tentu mereka yang menjadi korban perbuatan keji ini harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah agar psikis anak tidak terganggu," pungkasnya.



Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Komisi X DPR RI

"Usut tuntas perbuatannya, selain perbuatannya keji dan bejat juga sangatlah tidak manusiawi. Perbuatan kejinya menodai dan mencemarkan nama baik lembaga pendidikan. Padahal tujuan pendidikan adalah untuk menanamkan spiritualitas keagamaan dan pendidikan akhlak mulia peserta didik bukan justru merusak nya dengan perbuatan keji"

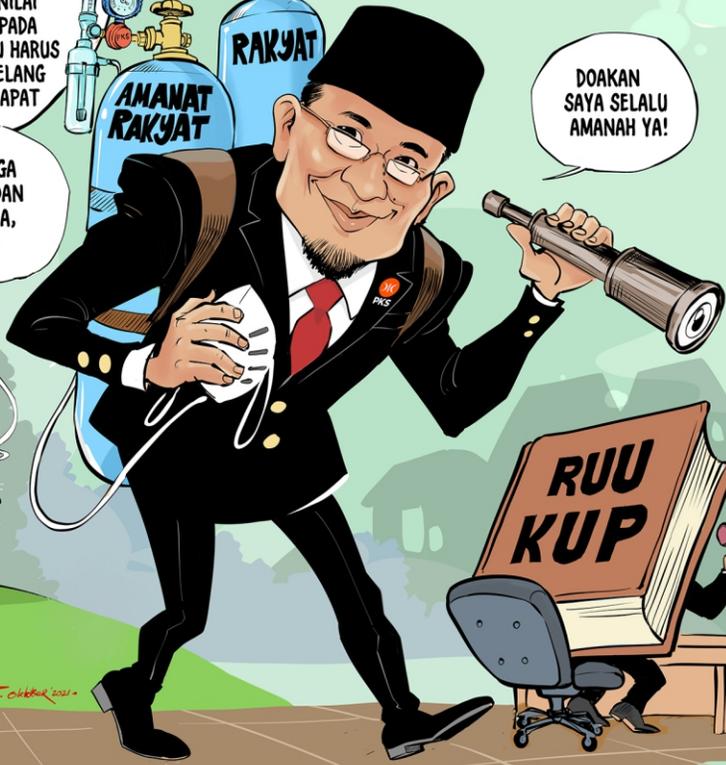


HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

USTADZ ECKY
AWAL MUCHARAM,
ALEG DARI @FPKSDPRRI
SAKING INGIN MENGAWAL
KHAWATIR RUU PERPAJAKAN
LOLOS BEGITU SAJA
TANPA ADA NILAI-NILAI
KEBERPIHAKAN KEPADA
MASYARAKAT.. WALAU HARUS
MENGUNAKAN SELANG
OKSIGEN KETIKA RAPAT

SEMOGA
SEHAT DAN
KUAT YA,
KANG

DOAKAN
SAYA SELALU
AMANAH YA!



Wan - Oktober 2021

Komisi XI FPKS: Ibukota Baru **Berpotensi** Menambah Defisit Fiskal, Utang Akan Melonjak

KUTIPAN

Jakarta (19/12) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayatullah mengkritisi langkah pemerintah yang menggebut proyek Ibukota Negara baru.

"Harus dicermati, apakah ibukota baru ini menguntungkan bagi rakyat atau justru menguras anggaran untuk kesejahteraan rakyat, kemudian secara fiskal memadai tidak" ujarnya di Senayan, Jakarta (17/12/2021).

Menurut legislator PKS ini pembangunan ibukota baru seharusnya bukan masuk prioritas tahun depan. Alasannya anggaran negara fokus untuk mengatasi perkonominan pasca pandemi mulai dari kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan kesehatan.

"Kemakmuran rakyat adalah prioritas sesuai yang diamanatkan UUD/45 Pasal 23 Ayat 1 yakni APBN sebagai keuangan negara dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat." ujarnya.

Hidayatullah mengingatkan utang negara pasca pandemi kian melonjak, sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sudah memberikan peringatan atas utang RI yang sudah melebihi batas yang direkomendasikan oleh International Debt Relief (IDR) dan IMF.

"Rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77% melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35%; sementara Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06% melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6%-6,8%," katanya.

Menurut anggota Komisi XI ini pemerintah semestinya bijak memfokuskan anggaran tahun depan dan tahun berikutnya untuk penanganan pandemi

dan perkonominan yang berdampak.

"Tugas berat pemerintah ialah menurunkan kembali defisit APBN menjadi 3% pada 2023 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020, defisit tahun 2020 saja mencapai 6,09% kemungkinan tahun 2021 dikisaran 5% lebih, sehingga pemerintah harus berhemat dan fokus pada pemulihan ekonomi bukan mengesa proyek mercusuar yang berpotensi menambah utang baru" katanya.

Mengenai komitmen pemerintah untuk tidak mengandalkan APBN sebagai pembiayaan ibukota baru, Anggota DPR RI ini menyangsikan.

"Kereta Cepat Jakarta Bandung saja yang diklaim akan menggunakan model pendanaan swasta, akhirnya uang APBN juga menambal dengan angka fantastis 150-an triliun rupiah, apalagi ini ibukota negara," katanya.

**H. HIDAYATULLAH, S.E.**

Dapil Sumatera Utara I

Tugas berat pemerintah ialah menurunkan kembali defisit APBN menjadi 3% pada 2023 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020, defisit tahun 2020 saja mencapai 6,09% kemungkinan tahun 2021 dikisaran 5% lebih, sehingga pemerintah harus berhemat dan fokus pada pemulihan ekonomi bukan mengesa proyek mercusuar yang berpotensi menambah utang baru"

Cukai Hasil Tembakau Naik, Efektif Turunkan Prevalensi Merokok?

KUTIPAN

Jakarta (17/12) --- Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) 2022 ditetapkan sebesar 12 persen secara rata-rata. Bakal efektif turunkan prevalensi merokok?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kenaikan tarif cukai rokok bertujuan untuk mengendalikan konsumsi rokok karena alasan kesehatan.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati berharap adanya kebijakan tersebut bisa menurunkan konsumsi rokok dan berimbas pada peningkatan kesehatan masyarakat. Namun di sisi lain, dia menilai barang yang mengandung zat nikotin tersebut sudah tidak lagi dipengaruhi oleh harga.

Dengan menurunnya prevalensi merokok masyarakat, Anis menyebut biaya kesehatan masyarakat diharapkan juga bisa berkurang.

"Jika kita lihat dari sisi lain dinaikkannya CHT, maka bisa juga terjadi turunnya permintaan pasar dan menggeser konsumen untuk beralih membeli produk lainnya,

sehingga pergerakan ekonomi juga diharapkan bisa tetap terjadi," jelas Anis kepada Bisnis, Selasa (14/12/2021).

Kendati demikian, Anis mengingatkan kepada pemerintah bahwa rokok sudah kepalang menjadi produk inelastis, atau barang konsumsi yang relatif tidak dipengaruhi oleh harga.

Dalam artian, kenaikan harga rokok tidak membuat orang berhenti merokok melainkan beralih mengonsumsi barang serupa dengan harga yang lebih murah bahkan ilegal.

"Mengingat daya beli masyarakat yang masih melemah, kenaikan CHT berpeluang menyuburkan peredaran rokok ilegal. Untuk itu harus ada langkah efektif yang dilakukan untuk mencegah adanya modus-modus baru penjualan rokok

ilegal," kata Anis.

Hal yang sama disampaikan oleh Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet. Yusuf menilai kenaikan tarif CHT selama ini sudah berbanding lurus dengan penurunan prevalensi merokok pada masyarakat. Akan tetapi, penurunan tersebut relatif kecil pada setiap tahunnya.

Oleh sebab itu, menurutnya efektifitas kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) oleh pemerintah setidaknya bisa menggerakkan konsumsi rokok, meskipun tidak terlalu berdampak secara signifikan.

"Data dari Kementerian Kesehatan di tahun 2007 [menunjukkan] prevalensi konsumsi tembakau baik dihisap atau dikunyah, itu mencapai sekitar 34 persen secara total, sementara di 2018 itu turun menjadi 33 persen.

Artinya, terjadi penurunan yang relatif kecil," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (15/12/2021).

Adapun, berikut pokok-pokok kebijakan cukai rokok atau CHT 2022:

1. Kenaikan Tarif Cukai per Jenis Rokok



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

"Jika kita lihat dari sisi lain dinaikkannya CHT, maka bisa juga terjadi turunnya permintaan pasar dan menggeser konsumen untuk beralih membeli produk lainnya, sehingga pergerakan ekonomi juga diharapkan bisa tetap terjadi"

Kenaikan tarif cukai Sigaret Putih Mesin (SPM):

- a. SPM golongan I: 13,9 persen;
- b. SPM golongan IIA: 12,4 persen;
- c. SPM golongan IIB: 14,4 persen.

Sigaret Kretek Mesin (SKM):

- a. SKM golongan I: 13,9 persen;
- b. SKM golongan IIA: 12,1

persen; c. SKM golongan IIB: 14,3 persen.

2. Sigaret Kretek Tangan

- a. SKT 1A 3,5 persen; b. SKT 1B 4,5 persen; c. SKT II 2,5 persen;
- d. SKT III 4,5 persen.

Aleg PKS Ingatkan Kemenlu Taat Konstitusi Terkait Normalisasi Hubungan dengan Israel

KUTIPAN

Jakarta (27/12) — Isu normalisasi hubungan Indonesia-Israel kembali menyeruak. Tak terlepas dari pertemuan antara Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat dan Indonesia bertemu di Jakarta pekan lalu.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, dan Menlu Indonesia, Retno Marsudi, disebut membahas kemungkinan normalisasi hubungan RI dengan Israel.

Anggota Fraksi PKS DPR RI, Dr. Syahrul Aidi Maazat sekaligus sebagai Ketua Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI untuk Palestina menanggapi atas isu yang beredar tersebut. Saat dihubungi pada Jumat (25/12/3021).

Syahrul menganggap itu akan jadi polemik dalam negeri ketika Palestina masih dijajah oleh Israel malahan pemerintah ingin membuka wacana normalisasi hubungan dengan

Israel.

"Pemerintah, khususnya Kemenlu jangan membuka celah untuk menambah polemik dalam negeri dengan cara memulai pembicaraan normalisasi hubungan dengan Israel," kata Syahrul Aidi.

Dia menegaskan, sikap Indonesia sejak merdeka jelas, selagi Palestina masih mereka jajah, maka tak ada pengakuan kedaulatan Israel.

Dia menyebut bahwa amanah pendiri bangsa yang dibunyikan dalam Alinea pertama UUD 1945 yang menyebut bahwa "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka

penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

"Maka, selama dalam pembukaan konstitusi Indonesia masih tertera kalimat penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, maka sebelum Palestina merdeka tidak mungkin bagi Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang menjajah bangsa Palestina. Jika dipaksa sudah jelas pemerintah melanggar konstitusi." tegasnya.

Seharusnya, saat ini semua energi kita tercurahkan agar keluar dari krisis ekonomi sudah jelas pemerintah sudah pandemi Covid-19. Jangan ada hal-hal lain mengganggu hal tersebut.

Dia menegaskan posisi Indonesia harusnya diperkuat di mata dunia internasional agar mendorong rekonsiliasi dan pengakuan atas negara Palestina. Bukan itu saja, Indonesia harus mendukung upaya pengembalian tanah Palestina yang dicaplok oleh Israel selama ini.



**Dr. H. SYAHRUL AIDI
MAAZAT, Lc., M.A.**

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Palestina

“Selama dalam pembukaan konstitusi Indonesia masih tertera kalimat penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, maka sebelum Palestina merdeka tidak mungkin bagi Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang menjajah bangsa Palestina. Jika dipaksa sudah jelas pemerintah melanggar konstitusi”

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Mengisi Masa Reses, Ledia Adakan Pertemuan Dengan Para Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta

KUTIPAN

Bandung – Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah melakukan kegiatan silaturahmi dan diskusi dengan para Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menerima mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Kota Bandung, Jawa Barat Jumat (24/12) di Restoran Sindang Reret, Coblong, Kota Bandung.

Dalam kegiatan tersebut, anggota Komisi X itu menyampaikan bahwa kampus swasta harus mempunyai daya saing agar bisa maju. Apalagi banyak kampus swasta yang awalnya didirikan untuk memberikan kesempatan dan kemudahan akses bagi para mahasiswa yang tidak memiliki kesempatan saat mendaftarkan seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

“Ketika kita bicara SDM maka Pendidikan adalah salah satu pendukung kualitas SDM itu. Dan kita tentu sama berharap agar para anak bangsa di negeri ini bisa mencapai pendidikan sampai ke tingkat

perguruan tinggi. Maka menguatkan kampus-kampus dengan peningkatan fasilitas sekaligus membuka jalan para pelajar adalah sebuah keniscayaan.” Kata Ledia Ledia kemudian menjelaskan mengapa ketika ada kesempatan memberikan advokasi bagi mahasiswa lewat program-program seperti UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dia memprioritaskan kampus-kampus swasta.

“Sebab kampus negeri umumnya sudah banyak memperoleh fasilitas dari pemerintah.” Kata Ledia

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini kemudian juga menurkan pentingnya pertemuan-pertemuan dengan pihak kampus seperti ini karena bisa langsung mendapatkan masukan dan paparan pengalaman dari pihak kampus termasuk hambatan-hambatan dan kesulitan yang muncul. Masukan-masukan tersebut Bersama masukan masukan dari orangtua ini menjadi bahan yang bisa memperkaya diskusi saat rapat kerja dengan pihak Kemenrikbudristek.

Dulu misalnya yang boleh menerima KIP Kuliah disyaratkan hanya untuk kampus dengan akreditasi A dan B. Tapi kenyataan di lapangan hal itu justru memberatkan karena banyak orangtua “tidak berani” mendaftarkan anak ke kampus dengan akreditasi tersebut dengan alasan kendala biaya. Begitu juga banyak kampus enggan bekerjasama karena selisih biaya kuliah yang harus mereka tanggung.

“Dengan banyak masukan, kami di Komisi X bisa berdiskusi panjang juga dengan pihak Kemendikbudristek untuk melaku-



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat I

“Dengan banyak masukan, kami di Komisi X bisa berdiskusi panjang juga dengan pihak Kemendikbudristek untuk melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan. Maka sekarang komponen biaya KIP Kuliah ada penyesuaian terkait akreditasi prodi dan indeks harga daerah. Mahasiswa terbantu untuk kuliah dan kampus pun terdorong untuk melakukan peningkatan mutu”

kan perbaikan-perbaikan kebijakan. Maka sekarang komponen biaya KIP Kuliah ada penyesuaian terkait akreditasi prodi dan indeks harga daerah. Mahasiswa terbantu untuk kuliah dan kampus pun terdorong untuk melakukan peningkatan mutu.”

Hadir dalam pertemuan ini para rektor dan pimpinan sebelas perguruan tinggi swasta, diantaranya dari STIE Tridharma, Stikes Budi Luhur, Universitas Muhammadiyah, STKIP Pasundan, Politeknik TEDC.

Hermanto Arungi Sungai Batanghari Temui Milenial di Lokasi Terisolir

KUTIPAN

Padang (27/12) — Anggota DPR RI Dapil Sumbar I Hermanto dalam rangkaian kunjungannya di daerah pemilihan mengunjungi masyarakat terisolir di Nagari Lubuk Ulang-Aling Selatan dan Nagari Lubuk Ulang-Aling Tengah, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan.

Untuk menuju ke dua lokasi tersebut Hermanto beserta rombongan harus mengarungi sungai Batanghari menggunakan tempék (sampan).

Dalam kunjungan tersebut Hermanto menemui milenial setempat.

"Saat ini kita berhadapan dengan situasi lingkungan pergaulan yang kurang bersahabat.

Kaum muda senang dengan hoax yang diedarkan di media sosial," ujar Hermanto.

Menurutnya, segala hal yang ada di benak ditulis dan disebar melalui media sosial (medsos).

"Ujaran kebencian misalnya. Banyak tersebar di medsos. Situasi menjadi panas terus," tutur legislator dari FPKS DPR RI ini.

Ia meminta para milenial agar menyaring informasi secara bertanggung jawab.

"Kalau mau merespon maka berikan respon yang baik-baik. Sehingga suasana pergaulan masyarakat di dunia maya menjadi lebih kondusif," pungkas Hermanto.

Dalam kunjungan tersebut Hermanto didampingi oleh dua tokoh setempat Ari Hendratno dan Effendi Muharram.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

"Saat ini kita berhadapan dengan situasi lingkungan pergaulan yang kurang bersahabat. Kaum muda senang dengan hoax yang diedarkan di media sosial, segala hal yang ada di benak ditulis dan disebar melalui media sosial (medsos). Ujaran kebencian misalnya. Banyak tersebar di medsos. Situasi menjadi panas terus,"

Masa Reses, HNW Berikan Bantuan Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis

KUTIPAN

Jakarta (23/12) — Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri) sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid melaksanakan Reses dengan menemui konstituen di dapilnya dan menyerahkan Bantuan Pembangunan Lapangan Bulu tangkis

sesuai aspirasi Warga RT 002 /004 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan.

HNW Wakil Rakyat yang dikenal punya hobi main badminton ini menyatakan senang bisa memenuhi aspirasi warga di dapilnya.

“Kami sambut aspirasi warga dengan membantu pembangunan lapangan bulu tangkis, agar warga Petukangan Utara bisa berolahraga dan menyalurkan hobi bulu tangkisnya. Olahraga ini juga menjadi sarana hadirkan imunitas tubuh karenanya bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah covid-19, baik dari sisi kesehatan fisik,

mental, maupun sosial,” ujar Hidayat dalam sambutannya kepada warga Petukangan Utara, Selasa (21/12/2021).

HNW berharap agar pembangunan lapangan bulu tangkis juga dapat membantu menggiatkan olahraga dikalangan warga dan generasi milenialnya, sehingga bisa menjadi sarana regenerasi atlet bulutangkis, agar bisa terus melanjutkan tradisi bulutangkis menghormati nama Indonesia dengan kemarin membawa kembali pulang piala Thomas Cup 2020, dan agar juga bisa mengembalikan Piala Sudirman ke Tanah Air.

“Kami akan terus mendorong pengembangan

olahraga dari tingkat warga hingga ke tingkat nasional, khususnya bulutangkis, baik melalui bantuan pembangunan lapangan maupun melalui penyelenggaraan perlombaan HNW Cup, yang juga sudah saya selenggarakan beberapa kali, baik pada skala antar klub di Jakarta Selatan, maupun di tingkat Nasional,” ujarnya.

Turut hadir dalam penyerahan bantuan lapangan yakni Ketua RW 04 Hermanto, Ketua RT 002/04 Zaenalhadi, FKDM RW 04 Syubhan, Ketua Panitia Pembangunan Lapangan Heru Darwis, S.E, para tokoh masyarakat, Warga RT.002/04, dan Karang Taruna RT. 002/04.

HNW menjelaskan bahwa bulutangkis adalah olahraga merakyat. Selain untuk menjaga kebugaran dan menjaga kesehatan dengan aktif main badminton, HNW berharap lapangan bulutangkis bantuannya tersebut juga bisa digunakan sebagai sarana warga untuk berkumpul & bersilaturahmi membahas hal-hal yang terkait dengan kegiatan warga.



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

“Kami sambut aspirasi warga dengan membantu pembangunan lapangan bulu tangkis, agar warga Petukangan Utara bisa berolahraga dan menyalurkan hobi bulu tangkisnya. Olahraga ini juga menjadi sarana hadirkan imunitas tubuh karenanya bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah covid-19, baik dari sisi kesehatan fisik, mental, maupun sosial”

“Selain untuk bulutangkis, lapangan ini juga dapat digunakan untuk kegiatan serba guna sebagai tempat hajatan baik pernikahan, sunatan massal, tahlilan, rapat RW, RT,

mengatasi banjir, vaksinasi, posyandu, dan kegiatan lainnya,” jelasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aboe Bakar Bagikan 1500 Paket Sembako Saat Reses

KUTIPAN

Banjarmasin (27/12) — Bencana banjir melanda beberapa wilayah Indonesia pada beberapa waktu terakhir, salah satunya di Kecamatan Negara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk membantu masyarakat terdampak Banjir Habib Aboe Bakar membagikan 1500 paket sembako pada Sabtu, (25/12).

Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyerahkan secara simbolik 1500 paket bantuan sembako untuk bencana Banjir yang terjadi di Kecamatan Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepada relawan PKS setempat.

“Ini sebenarnya agenda utama kita adalah reses, namun karena ada yang tertimpa musibah banjir, kita ikut serta membantu berpartisipasi” ujar Anggota DPR RI dari Dapil Kalsel I tersebut.

Sebagai orang Dapil, Habib Aboe Bakar memahami dengan baik problematika dan karakter masyarakat setempat.

“Banjir rob karena

genangan di wilayah negara tersebut bisa bertahan antara satu sampai dua bulan. Pada umumnya Masyarakat setempat sudah menganggap itu hal biasa, karenanya mereka tidak mau mengungsi atau dibantu evakuasi,” papar Sekjend DPP PKS tersebut.

Karena hal itu pihaknya tidak mendorong adanya evakuasi warga. Lebih lanjut, Habib Aboe menyampaikan bahwa apa yang dilakukan adalah bagian dari solidaritas untuk masyarakat setempat.

“Dengan bantuan ini, diharapkan akan meringankan beban mereka dan bisa membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat disaat tergenang banjir,” terang Ketua MKD DPR RI tersebut.



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I

“Ini sebenarnya agenda utama kita adalah reses, namun karena ada yang tertimpa musibah banjir, kita ikut serta membantu berpartisipasi. “Banjir rob karena genangan di wilayah negara tersebut bisa bertahan antara satu sampai dua bulan. Pada umumnya Masyarakat setempat sudah menganggap itu hal biasa, karenanya mereka tidak mau mengungsi atau dibantu evakuasi”



Profil

- Nama Lengkap
H. Iskan Qolba Lubis, M.A
- Tempat, Tanggal Lahir
Sibuhuan, 01 Juli 1961
- Dapil
Sumatera Utara II



Riwayat Pekerjaan

- Dosen Ma'had Al-Hikmah
Jakarta
- Dosen Sekolah Tinggi
Tafsir Hadis
- Konsultan "Syariah Consulting
Center" Jakarta



Riwayat Organisasi

- Ketua Yayasan Bumi Andalas
- Ketua Pusat Studi Islam
Fajar Hidayah



Keluarga

- Istri : **Erni Asfiati
Hasibuan**
- Anak : **3 Laki-Laki
2 Perempuan**



Pendidikan

- Pondok Pesantren AEK
HAYUARA (Tsanawiyah
& Aliyah)
- S1 Fak. Ushuhuludin
Univ. Al-Azhar Mesir, 1987
- S2 Islamic Studies, Punjab
University, Lahore, Pakistan
1990
- S2 Magister Arabic
Language Islamabad,
1992



Media Sosial

f : Iskan Qolba Lubis / Sahabat Iskan Qolba Lubis
@ : @sahabatiskanqolbalubis / iskanql t : @IskanQL

ISKAN QOLBA LUBIS

Hadiri Bazaar Komunitas Lubang Buaya di TMII, Anis Apresiasi UMKM Kembali Bangkit

KUTIPAN

Jakarta (27/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jakarta Timur, Anis Byarwati menghadiri undangan dan memberikan sambutan pada Bazaar Komunitas UMKM Lubang Buaya.

Acara ini berlangsung di Pelataran Teater Imax Keong Mas Taman Mini Indonesia Indah. Turut hadir dalam acara ini Ketua Komunitas UMKM Lubang Buaya, Eko Wahyu Samodra, Direktur Eksekutif TMII, I Gusti Putu Ngurah Sedana, Pembina UMKM Lubang Buaya, Mas'ud Thayib, Camat Cipayung, Pananganan Ritonga, serta sekitar 50 pelaku UMKM peserta bazaar.

Dalam kesempatan ini, Anis yang merupakan Pembina Dewan UMKM Nasional, mengungkapkan bahwa kerjasama banyak pihak untuk meningkatkan produktifitas UMKM perlu terus dilakukan.

"Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kerjasama yang baik untuk meningkatkan

daya tarik bagi pengunjung TMII dengan adanya Bazaar. Semoga acara ini menjadi stimulus bagi UMKM untuk dapat tumbuh dan bangkit kembali," ungkapnya.

Bazaar UMKM yang rencananya digelar selama sepuluh hari ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan taraf pendapatan para pelaku UMKM, karena hal tersebut juga akan membantu peningkatan perekonomian negara.

"Struktur perekonomian negara kita 99,9% ditopang oleh UMKM dan menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sebanyak 96,92% tenaga kerja diserap berasal dari UMKM. Oleh karena itu kontribusi UMKM terhadap pendapatan negara sangat besar. Jadi apabila UMKM kita

dapat tumbuh, tangguh, dan mampu berdaya saing, maka struktur ekonomi Indonesia akan semakin terbantu dan maju," kata Anis.

Selain itu, Anis mendorong agar UMKM bisa naik kelas. Diantaranya melakukan penyesuaian dengan kemajuan teknologi digital.

Pada tahun 2021 ini, ada 64,2 juta pelaku UMKM dan hanya 19 persen yang sudah on boarding di ekosistem digital atau sekitar 12 juta UMKM. UMKM Lubang Buaya perlu meningkatkan kualitas dan produktivitasnya dengan masuk kedalam pemasaran online," paparnya.

Menutup kunjungannya, ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini berkeliling melihat bazar UMKM dan mengapresiasi kerjasama seluruh pihak sehingga acara Bazaar UMKM ini dapat terselenggara.

Anis juga menyapa dan berdialog dengan peserta Bazaar UMKM yang sangat antusias mengikuti kegiatan ini.



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

"Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kerjasama yang baik untuk meningkatkan daya tarik bagi pengunjung TMII dengan adanya Bazaar. Semoga acara ini menjadi stimulus bagi UMKM untuk dapat tumbuh dan bangkit kembali"



Giat Reses, Bukhori Serahkan Bantuan ATENSI bagi Lansia di Kabupaten Semarang

KUTIPAN

Semarang (27/12) — Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 1 Bukhori Yusuf, melakukan kegiatan reses dengan menyerahkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) bagi warga lansia binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) Wisma Lansia Raden Rahmat Kabupaten Semarang, Sabtu (25/12/2021).

Anggota Komisi VIII DPR itu menyerahkan bantuan senilai Rp74,7 juta untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi, kebutuhan dasar, sarana kamar, dan kebersihan diri bagi 22 lansia penghuni wisma lansia.

Program bantuan ATENSI tersebut berhasil terselenggara atas kerja sama pihaknya dengan Kementerian Sosial RI.

Untuk diketahui, ATENSI adalah layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan/residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial,

dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.

Bukhori menjelaskan, Negara memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan kesejahteraan, perawatan, perlindungan, dan pelayanan berdasarkan kasih sayang agar mereka dapat menikmati taraf hidupnya dengan wajar. Tanggung jawab tersebut telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.

Di sisi lain, demikian lanjutnya, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam melakukan pelayanan sosial terhadap lansia dengan membentuk organisasi atau perkumpulan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang berfokus pada advokasi lansia dalam wadah yang disebut Lembaga Kesejahteraan Sosial. Terkait hal itu, ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 19 Tahun 2013 tentang Asistensi Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

"ATENSI adalah salah satu contoh kebijakan inklusif yang patut diapresiasi. Program ini tidak menitikberatkan pada peran pemerintah semata dalam menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat, melainkan juga mendorong partisipasi aktif warga negara untuk bersama-sama mengentaskan permasalahan sosial di sekitar kita, termasuk persoalan kesejahteraan lansia," ucapnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



KH. BUKHORI, Lc., M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

"ATENSI adalah salah satu contoh kebijakan inklusif yang patut diapresiasi. Program ini tidak menitikberatkan pada peran pemerintah semata dalam menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat, melainkan juga mendorong partisipasi aktif warga negara untuk bersama-sama mengentaskan permasalahan sosial di sekitar kita, termasuk persoalan kesejahteraan lansia"





Bantu Petani, Rofik Serahkan 169 Paket Konverter BBM ke BBG di Kabupaten Purbalingga

KUTIPAN

Purbalingga (15/12) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto menyerahkan 169 paket Konverter kit BBM ke BBG kepada petani sasaran di UPTD Perbenihan Dinas Pertanian di Mewek, Purbalingga.

Rofik diwakili anggota DPRD FPKS Provinsi Jawa Tengah Tri Mulyantoro membagikan paket Konverter kit yang terdiri dari 1 unit mesin pompa air, konverter kit BBM ke BBG dan aksesorisnya, 1 buah tabung LPG 3 kg dan isinya serta oli mesin.

Program konversi bbm ke lpg untuk petani sasaran adalah salah satu upaya Komisi VII DPR RI bersama pemerintah untuk dalam meningkatkan penggunaan energi ramah lingkungan untuk mengurangi polusi udara dan pencemaran lingkungan.

LPG sebagai salah satu bahan bakar sudah akrab di masyarakat sebagai bahan bakar rumah tangga, berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan bakar mesin pompa air irigasi

berdaya rendah.

Kegiatan pendistribusian dihadiri perwakilan Kementerian ESDM Agung Kuswardono, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Agus Winarno, Kepala Dinas Pertanian Mukodam, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Johan Arifin dan perwakilan Pertamina Patra Niaga Imam Rizki Arianto.

Kepala Dinas Pertanian Mukodam mengatakan, pemberian konverter kit ini sangat tepat karena di Purbalingga ada wilayah pertanian yang kesulitan air di saat musim kemarau meski berada di sekitar sungai. Seperti di wilayah Kecamatan Kemangkon.

"Harapannya

pendistribusian paket konverter ini bisa meningkatkan indeks pertanian. Yang biasanya 1 kali tanam dalam setahun bisa menjadi 2 kali tanam. Yang 2 kali menjadi 3 kali. Agar ketahanan pangan tetap terjaga," katanya.

Mukodam menilai, penggunaan paket konverter berbahan gas ini menjadi efektif dan efisien bagi para petani karena biaya operasional lebih murah dibandingkan menggunakan BBM.

Perwakilan Kementerian ESDM Agung Kuswardono mengatakan, anggota DPR RI FPKS yang juga anggota Komisi VII Rofik Hananto telah memperjuangkan agar Purbalingga mendapatkan bantuan paket konverter ini.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

“Bantuan tabung gas elpiji yang merupakan satu paket konverter ini jangan dipakai untuk keperluan memasak di rumah. Namun gunakan untuk pertanian. Untuk kontinuitas, ke depan akan kita siapkan beberapa pangkalan elpiji untuk khusus melayani petani”





**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri

Kundapil, Aus Hidayat Nur **Bantu** Mushalla Berharap Bisa Bermanfaat Bagi Warga

KUTIPAN

Balikpapan (17/12) -- Disela-sela agenda kunjungan Dapil, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aus Hidayat Nur bersilaturahmi dengan pengurus Mushalla Nur Huda, yang terletak di RT 8 kelurahan Muara Rapak, kecamatan Balikpapan Utara yang langsung disambut Ketua RT 08 Asikin.

Dalam bincang santai selepas Ashar itu, Aus Hidayat Nur bercerita tentang fungsi masjid dan mushalla bagi masyarakat sekitarnya.

"Masjid dan mushalla itu penting sebagai tempat peningkatan keimanan dan ketakwaan warga sekitarnya," ujar Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur yang juga Anggota Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI.

"Tentu diperlukan pengurus mushalla yang mampu menghidupkan musholla nya dengan berbagai macam

kegiatan untuk jamaahnya. Baik dalam bentuk Ta'lim, shalawatan, untuk ibu-ibu maupun bapak-bapak," tambahnya.

Pria yang sejak 30 tahun lalu telah melanglang buana dalam aktivitas dakwah di Kalimantan Timur ini juga berpesan pentingnya menyiapkan generasi penerus yang akan meneruskan pengelolaan mushalla bila generasi pengurus saat ini menemui ajalnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



KH. AUS HIDAYAT NUR
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Timur

"Masjid dan mushalla itu penting sebagai tempat peningkatan keimanan dan ketakwaan warga sekitarnya. Tentu diperlukan pengurus mushalla yang mampu menghidupkan musholla nya dengan berbagai macam kegiatan untuk jamaahnya. Baik dalam bentuk Ta'lim, shalawatan, untuk ibu-ibu maupun bapak-bapak"

Masa Reses, Iskan **Hadir** Temui Warga Korban Bencana Gunung Sitoli dan Nias Utara

KUTIPAN

Kabupaten Nias Utara (22/12) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, mengunjungi warga korban bencana gunung Sitoli dan Nias Utara, dalam kesempatan tersebut Iskan menemui dan memberikan bantuan kepada masyarakat di daerah Nias Utara.

"Alhamdulillah hari ini saya dapat secara simbolis memberikan bantuan dari Kementerian Sosial kepada masyarakat di kabupaten nias utara dampak dari korban bencana gunung sitoli, banjir serta longsor. Adapun bantuan tersebut berbentuk Paket Sembako sebanyak 75 paket (1truk) dan di kabupaten nias utara rincian nya adalah sebagai berikut ; Matras 100 Lembar, Kasur 15 Lembar, Selimut 100 Lembar, Family Kit 50 Paket, kidsware 15 paket, Tenda Gulung 50 lembar, Makanan Anak 150 paket, Foodware 9 paket. Dengan mengucap Bismillahirohmanirohim, saya melepas bantuan

dari kemensos dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Nias Utara", Terang Iskan.

Anggota Legislative Fraksi PKS asal sibuhuan ini juga menambahkan serta menyema-ngati dalam kesempatan tersebut kepada warga yang terdampak bencana di kabupaten nias utara agar sama sama terus beribadah serta berdo'a kepada Tuhan agar selalu diberikan perlindungan dari bencana alam.

"Bapak/Ibu kita ini adalah manusia yang beragama. Baik yang muslim, yang kristen, dan agama lainnya, mari kita sama sama untuk rajin beribadah. Supaya tuhan tetap sayang dan

tetap lindungi kita. Mudah mudahan bencana ini bisa membawa pelajaran dan hikmah yang baik bagi kita, serta satu sama lain saling peduli dan tolong menolong," Ujar Iskan.

Dalam penutupan kegiatan pertemuan dengan para korban bencana gunung sitoli dan nias utara, Iskan juga menambahkan akan membantu untuk perbaikan rumah warga yang terdampak bencana tersebut.

"Saya Iskan Qolba Lubis dari Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Insha Allah akan membantu segera rumah rumah yang rusak ringan sedang, dan berat. Saya minta Kepala Desa disini berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemerintah Kabupaten agar segera nanti dipersiapkan persyaratan nya ya. Nanti biar saya akan bantu dorong ajuan itu langsung ke Menteri, untuk dapat segera terealisasi pembangunan atau perbaikan rumah rumah yang rusak akibat banjir disini", Pungkask Iskan mengakhiri.



H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Dapil Sumatera Utara II

"Saya Iskan Qolba Lubis dari Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Insha Allah akan membantu segera rumah rumah yang rusak ringan sedang, dan berat. Saya minta Kepala Desa disini berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemerintah Kabupaten agar segera nanti dipersiapkan persyaratan nya ya. Nanti biar saya akan bantu dorong ajuan itu langsung ke Menteri, untuk dapat segera terealisasi pembangunan atau perbaikan rumah rumah yang rusak akibat banjir disini"

Gandeng BUMN, Rafli Sosialisasi Pemulihan Ekonomi Nasional di Aceh

KUTIPAN

Banda Aceh (20/12) --- Dalam upaya mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Anggota DPR RI asal Aceh, Rafli bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar kegiatan sosialisasi kepada sejumlah pemuda dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pada Senin (20/12) di Kawasan Menasah Manyang, Kabupaten Aceh Besar.

Kegiatan dengan tema BUMN sebagai lokomotif pemulihan ekonomi nasional tersebut menghadirkan pemateri dari unsur akademik Talbani Farlian dan Ferry Hariawan yang merupakan ketua himpunan pekerja BUMN Aceh.

Sambutan resmi DPR RI Rafli, dibacakan oleh Tenaga Ahli Komisi VI DPR RI, Mustafa Ali saat membuka kegiatan mengatakan Peran BUMN sebagai lokomotif pemulihan ekonomi dengan memprioritaskan UMKM sangat penting.

"Kita mendukung kontribusi BUMN di Aceh dan berharap Kementerian BUMN

dapat melibatkan UMKM dalam banyak lini usaha baik pengadaan barang dan jasa di BUMN sehingga serapannya maksimal, ataupun lainnya. Melalui kegiatan sosialisasi ini kita mencoba tawarkan strategi peningkatan secara menyeluruh agar dapat mewujudkan kontribusi investasi, sehingga dampak multiplier effect-nya juga akan sangat besar untuk rakyat dan negara" Ujarnya

Peran pemulihan, dikatakan Ferry Hariawan diantaranya dengan mensubsidi kebutuhan masyarakat melalui sejumlah Perusahaan BUMN, seperti Pegadaian, PLN dan

Kuota data seluler melalui Telkomsel.

Himpunan Bank Negara (Himbara) juga telah melakukan restrukturisasi kredit UMKM dan korporasi dengan total nilai sebesar Rp 441 triliun pada 2020, Bulog juga berperan.

Secara umum, dampak pandemi virus corona pada setiap sektor usaha memang berbeda. Covid-19 memiliki pengaruh minimal pada sektor kesehatan dan telekomunikasi. Namun dampaknya cukup besar pada sektor konstruksi dan transportasi, ini juga terus diupayakan pemulihannya sebagai peran BUMN" Kata Ferry

Hadir pada kegiatan yang berlangsung sehari tadi, Anggota DPR RI Rafli melalui virtual Zoom, sementara hadir fisik Ferry Hariawan, Talbani Farlian memberi pandangan civitas akademik, Tenaga Ahli Komisi VI Mustafa Ali Woyla, serta sekitar seratusan pemuda dan pelaku UMKM yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan diskusi.



RAFLI

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Nanggroe Aceh Darussalam I

"Kita mendukung kontribusi BUMN di Aceh dan berharap Kementerian BUMN dapat melibatkan UMKM dalam banyak lini usaha baik pengadaan barang dan jasa di BUMN sehingga serapannya maksimal, ataupun lainnya. Melalui kegiatan sosialisasi ini kita mencoba tawarkan strategi peningkatan secara menyeluruh agar dapat mewujudkan kontribusi investasi, sehingga dampak multiplier effect-nya juga akan sangat besar untuk rakyat dan negara"



Peduli Penyandang Disabilitas, Diah Nurwitasari Kunjungi SLB Roja

KUTIPAN

Bandung (22/12) --- Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kepada penyandang disabilitas, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bandung memperingati Hari Disabilitas Internasional dengan mengunjungi dan menyalurkan bantuan di SLB Roudhatul Jannah Soreang.

Kedatangan rombongan PKS ini disambut hangat oleh Kepala Desa Sekarwangi dan Kepala Sekolah beserta staf SLB Roudhatul Jannah.

Dalam sambutannya Imas Rohiyatiningsih mengungkapkan rasa Bahagia sekaligus terharu karena baru kali ini SLB-nya dikunjungi oleh pemerintah dan partai politik.

"Biasanya SLB apalagi SLB swasta seperti kami tidak ada yang memperhatikan, tapi alhamdulillah hari ini ada PKS yang mengunjungi kami," sambung Imas menyampaikan terimakasihnya.

Adapun dari PKS, yang ikut hadir dalam acara tersebut di adalah Gun Gun Gunawan, sebagai Ketua DPD PKS

Kabupaten Bandung dan Diah Nurwitasari sebagai Anggota DPR-RI dari Dapil Jawa Barat 2 yang meliputi Kabupaten Bandung dan KBB.

Gun Gun menyampaikan bahwa hadirnya PKS di tempat ini adalah sebagai ungkapan rasa cinta.

"Ini semua adalah bentuk cinta kami kepada anak-anak hebat di tempat ini, guru-guru SLB yang hebat dan penyabar, juga para orangtua terutama para ibu yang kuat dan tangguh membesarkan anak-anaknya. Selamat Hari Ibu juga, semoga ini semua berbuah pahala dan surga-Nya".

"Semoga ke depannya para penyandang disabilitas ini mampu diterima dengan baik di

masyarakat, mendapatkan hak-haknya, juga kesempatan berkarya dan bekerja demi masa depannya yang lebih baik," lanjut Gun Gun menyampaikan harapannya.

Senada dengan apa yang disampaikan Gun Gun, Diah Nurwitasari menyampaikan bahwa PKS sangat peduli dengan penyandang disabilitas.

"Bahkan Ketika penyusunan UU No.8 Tahun 2016 anggota DPR-RI dari PKS menjadi ketua Panja RUU Penyandang Disabilitas ini," Diah menegaskan.

"Setiap manusia dilahirkan sempurna, dan kita tak bisa menerjemahkan arti kata sempurna itu dengan sempurna karena setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang terpenting bagi kita adalah Allah menilai manusia dari kebersihan hatinya, keluhuran akhlakunya, kesehatan visi hidupnya, dan kesempurnaan ketakwaannya," ungkap wanita yang akrab disapa Teh Diah ini.

"Saya terkesan dengan nama SLB ini, Roudhatul Jannah yang berarti Taman Surga. Semoga ini menjadi do'a juga semangat bahwa pangihuni



Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat II

"Saya terkesan dengan nama SLB ini, Roudhatul Jannah yang berarti Taman Surga. Semoga ini menjadi do'a juga semangat bahwa pangihuni taman surga adalah para malaikat, itu artinya guru-guru di sini adalah para malaikat bagi para anak dan orangtua yang menyekolahkan anaknya disini"

taman surga adalah para malaikat, itu artinya guru-guru di sini adalah para malaikat bagi para anak dan orangtua yang menyekolahkan anaknya disini," ucap Diah menutup pembicaraannya.

Diakhir acara PKS memberikan bantuan berupa alat-alat peraga pembelajaran beserta sejumlah uang tunai secara simbolis kepada Kepala Sekolah dan siswa SLB Roja.



Live Interactive

Bersama
Anggota
Legislatif PKS



ERLANDA

WIDYA

YOANDRO



Saksikan Setiap Jum'at

pk. 13.30 s.d 14.30 WIB



Reses di Purwakarta, Syaikhu Serahkan Bantuan Program Indonesia Pintar kepada Siswa

KUTIPAN

Syaikhu yang juga Presiden PKS itu menegaskan terkait penggunaan PIP. Bantuan yang diterima tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bersifat pribadi dan konsumtif. Seperti membeli sembako, rokok, main game online dan sebagainya.

Kabupaten Purwakarta (25/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhu memberikan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) saat reses di Kabupaten Purwakarta. Siswa yang mendapatkan ini berasal dari SMPN 1 Jatiluhur SDN 5 Cikaobandung.

"Alhamdulillah akhirnya bantuan PIP dapat diterima oleh para siswa yang diusulkan," kata Syaikhu di hadapan kepala sekolah, guru, orang tua siswa dan siswa.

Syaikhu menjelaskan, PIP merupakan program Pemerintah Pusat untuk membantu siswa yang membutuhkan.

"Sebagian PIP ini diadvokasi dan disalurkan oleh Anggota DPR. Program ini dari Pemerintah Pusat untuk siswa," jelas Syaikhu.

Syaikhu yang juga Presiden PKS itu menegaskan terkait penggunaan PIP. Bantuan yang diterima tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bersifat pribadi dan konsumtif. Seperti membeli sembako, rokok, main game online dan sebagainya.

"Gunakan dana PIP ini untuk kepentingan sekolah. Bayar SPP, uang ekstrakurikuler dan lainnya. Jangan buat beli rokok dan main game online," tegas Syaikhu.

Ucapan terimakasih diberikan oleh Pihak Sekolah dan orangtua siswa.

"Terimakasih kepada Pak Syaikhu atas bantuan ini yang sebesar-besarnya," ujar salah seorang perwakilan orangtua siswa.

Lebih jauh dia berharap akan ada bantuan lain selain PIP.

"Kami dari orang tua mohon diperhatikan dalam segala hal. Bukan hanya PIP tapi juga program lain. Di daerah kami banyak sekali bantuan yang tidak tepat sasaran," ujarnya.

Hadir dalam acara ini Pimpinan DPD PKS Kabupaten Purwakarta, Anggota DPRD F-PKS Kabupaten Purwakarta, Tenaga Ahli DPR RI Pipin Sopian, BS Wibowo, Budiwanto dan Erwyn Kurniawan.



H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

"Alhamdulillah akhirnya bantuan PIP dapat diterima oleh para siswa yang diusulkan. PIP merupakan program Pemerintah Pusat untuk membantu siswa yang membutuhkan. Sebagian PIP ini diadvokasi dan disalurkan oleh Anggota DPR. Program ini dari Pemerintah Pusat untuk siswa"



Kunjungan Reses di Liliboy, Saadiah Minta Kementerian LHK Perhatikan Kebun Bibit Rakyat

KUTIPAN

Ambon (23/12) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK) memperhatikan Kebun Bibit Rakyat (KBR).

Permintaan Saadiah disampaikan kepada rombongan KHLK dalam kunjungannya dalam rangka Reses di Kebun Bibit Rakyat Negeri Liliboy Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah Minggu, (19/12/2021).

"Kebun Bibit Rakyat Negeri Liliboy selama ini telah menjadi pusat pengembangan persemaian dengan pola kebun bibit rakyat atau kebun bibit desa. Dalam skala besar, bibit persemaian dari KBR Liliboy dapat mendukung program menanam pohon", kata Saadiah.

Saadiah merinci, pengembangan persemaian dengan pola kebun bibit rakyat

atau kebun bibit desa akan memberi dampak ekonomis bagi masyarakat.

"KBR Negeri Liliboy dikelola dengan model persemaian bibit rakyat kelompok tani. KBR Negeri Liliboy tidak hanya anakan untuk kepentingan pemulihan lingkungan, namun juga memberi dampak ekonomis bagi masyarakat desa", urai tandas politisi PKS Dapil Provinsi Maluku.

Dalam kunjungannya, Saadiah menyaksikan penyaluran sejumlah bantuan pihak KLHK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada

Kelompok masyarakat kelompok tani.

"Ada dukungan terhadap kelompok masyarakat kelompok tani negeri Liliboy dengan penyerahan bantuan berupa uang 100 juta yang akan dibelanjakan untuk pembibitan, persemaian dan perawatan bibit dan anakan", Saadiah memberi apresiasi.

Menurutnya, Liliboy sudah terlatih dan berpengalaman sebagai penangkar bibit. Keberadaan mereka mendapat penilaian positif dari pemulia dan peneliti Balai Penelitian Rempah dan Obat.

"Selama ini sumber benih tanaman pala dan cengek di Liliboy sudah dinilai dan mendapat apresiasi positif dari Pemulia/Peneliti dari Balai Penelitian Rempah dan Obat (Balitro). Banyak masyarakat yang melakukan penangkar di samping rumah dan halaman mereka sehingga harapannya bisa dijadikan kampung penangkar", harap Saadiah.

Dirinya berharap, aktivitas masyarakat dalam memperhatikan tanaman bisa berdampak multiflayer.

"Selain fungsi pemulihan hutan dan ekologi serta konservasi juga nilai tambah pendapatan dan kesejahteraan masyarakat."

Saadiah terus mendorong KLHK untuk menersiusi pengembangan kebun bibit rakyat kelompok tani.

"Saya dorong Kementerian LHK memberi dukungan serius



SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

"Selama ini sumber benih tanaman pala dan cengek di Liliboy sudah dinilai dan mendapat apresiasi positif dari Pemulia/Peneliti dari Balai Penelitian Rempah dan Obat (Balitro). Banyak masyarakat yang melakukan penangkar di samping rumah dan halaman mereka sehingga harapannya bisa dijadikan kampung penangkar"

untuk pengembangan pusat persemaian kebun bibit rakyat bagi kelompok tani. Selain di Liliboy dapat diperluas pengembangannya di daerah

lainnya. Kebun bibit demikian akan menghidupkan geliat ekonomi masyarakat desa", harap Saadiah.

Masa Reses, Mahfudz Abdurrahman Bertemu Tokoh Muslimah Lintas Ormas Keumatan

KUTIPAN

Bekasi (26/12) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman mengisi masa reses dengan kegiatan temu silaturahmi dan dialog tokoh muslimah dari beberapa ormas Islam se-Kota Bekasi, Sabtu (25/10/2021).

Kedatangan Mahfudz Abdurrahman disambut para tokoh yang hadir di Aula Serbaguna DPD PKS Kota Bekasi.

Mahfudz Abdurrahman yang merupakan Wakil Rakyat dari Kota Bekasi dan Depok menyampaikan, saat ini PKS harus lebih banyak melakukan silaturahmi dan mendengarkan serta berusaha melaksanakan masukan dan nasehat dari para tokoh keumatan juga masyarakat.

Selain itu Mahfudz Abdurrahman juga menyampaikan perjuangan PKS dalam mengusulkan Undang-Undang yang berpihak pada Keumatan.

"Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa PKS harus banyak mendengar dan berusaha menindaklanjuti

saran dan usulan dan nasehat dari para tokoh sekaligus menyerap aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada pemilih di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat," jelas Mahfudz.

Disamping itu, kata Mahfudz, pihaknya juga memberikan sosialisasi tentang perjuangan PKS di parlemen dan membahas isu-isu hangat yang terjadi di tengah masyarakat.

"Dengan harapan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan bisa memahami atas isu-isu yang beredar", jelas Mahfudz.

Aleg PKS ini juga

menyampaikan ucapan terima kasih kepada para tokoh dan konstituen yang terus mendukung konsistensi perjuangan PKS, dan kini PKS dalam beberapa survei mengalami peningkatan elektabilitas, bahkan masuk dalam 3 besar.

Pada kesempatan ini Mahfudz Abdurrahman juga mengajak untuk bergabung dengan PKS sebagai hak politik anak bangsa.

"PKS tetap konsisten memperjuangkan janji politik pada Pemilu 2019 yakni memperjuangkan RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama serta beberapa isu-isu keumatan seperti perjuangan PKS dalam memperjuangkan RUU TPKS agar dimasukkan pasal larangan keras dan hukuman tegas terhadap perzinahan dan korban kekerasan seksual demi menjaga dan melindungi kaum perempuan Indonesia," tegas Mahfudz.

Mahfudz juga meminta doa dan dukungan dari para tokoh muslimah yang hadir agar PKS terus istiqamah memperjuangkan cita-cita



H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

"Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa PKS harus banyak mendengar dan berusaha menindaklanjuti saran dan usulan dan nasehat dari para tokoh sekaligus menyerap aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada pemilih di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat,"

kebangsaan untuk umat dan bisa menghadirkan kepemimpinan yang terbaik di Indonesia melalui legislatif maupun eksekutif.

"PKS siap untuk menyuatkan kepentingan umat di parlemen dalam bentuk UU. Mohon doa dan dukungannya, saat ini PKS terus memperjuang-

kan beberapa RUU keumatan dan juga RUU yang lainnya seperti Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama sebagai bentuk penghormatan kepada Ulama dan Tokoh Agama, RUU Larangan Minuman Beralkohol, dan RUU Kewirausahaan Nasional.



Sakinah Aljufri Prihatin Kondisi Pendidikan di Sulteng

KUTIPAN

Palu (25/12) — Anggota Komisi X DPR RI Sakinah Aljufri sedang fokus memperjuangkan pendidikan di Sulawesi Tengah (Sulteng). Hal itu dilakukan karena ia merasa prihatin dengan kondisi pendidikan di daerah tersebut.

Tidak main-main, ia menyalurkan puluhan ribu beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) lewat jalur aspirasi di Sulawesi Tengah pada tahun ini. Bukan hanya itu, berbagai upaya untuk memenuhi dan memperbaiki pendidikan di daerah pemilihannya juga dilakukan.

Saya melihat masih banyak sekolah, sarannya memprihatinkan. Kemudian banyak anak-anak kita yang ekonominya kurang mampu juga butuh perhatian. Inilah yang menjadi konsen kita untuk salurkan PIP aspirasi,” ungkap Sakinah saat menyerahkan bantuan alat kesenian di SMP Negeri 15 Palu, Jumat 24 Desember 2021.

Pemberian alat kesenian

itu pun merupakan bentuk kepedulian politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. Ia menyerahkan sepaket alat kesenian tradisional agar pelajar di SMP Negeri 15 bisa mengenal alat musik tradisional, khususnya alat musik tradisional dari daerah ini.

Sakinah yang merupakan tokoh perempuan Alkhairaat itu mengaku ingin fokus mengurus nasib pelajar yang kurang beruntung dari segi ekonomi di Sulawesi Tengah. Olehnya, ia berharap melalui Komisi X DPR RI, yang salah satu lingkup bidangnya adalah pendidikan, bisa membantu kemudahan dan kelayakan pendidikan.

“Saya sampaikan ke senior-senior saya (Anggota DPR

RI Dapil Sulteng), saya ingin tetap di komisi X mengurus pendidikan. Saya ingin fokus pendidikan. Karena masih banyak masyarakat saya yang butuh pendidikan. Saya bilang begitu, karena biasanya di DPR RI itu setiap tahun dipindah komisinya,” ujar Sakinah yang masih ingin bertahan di Komisi X DPR RI agar dapat terus membantu perbaikan nasib pendidikan di Sulawesi Tengah.

Dalam upaya memajukan pendidikan di Sulteng, melalui aspirasinya Sakinah membantu hampir di semua sektor pendidikan. Baik dari sekolah, tingkat pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, sampai dengan lembaga non perguruan yang berkaitan dengan pendidikan.

Sebagai bukti kerjanya memperjuangkan aspirasi masyarakat, ia menyalurkan 25.000 PIP aspirasi di tahun 2021 ini. PIP itu diberikan kepada peserta didik dari tingkat SD, SMP hingga SMA.

Kita bawa 25.000 (PIP) untuk SD, SMP, SMA, ini hak kita. Bahkan yang tidak mengusulkan ada yang kita kasih karena memang layak. Jangan ada yang berfikir tidak usah sekolah karena tidak ada biaya. Pemerintah hadir untuk itu. Melalui PIP Aspirasi inilah kita perjuangan,” tandasnya.

Bukan cuma itu, 500 Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui jalur aspirasinya pun



Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Tengah

“Saya melihat masih banyak sekolah, sarannya memprihatinkan. Kemudian banyak anak-anak kita yang ekonominya kurang mampu juga butuh perhatian. Inilah yang menjadi konsen kita untuk salurkan PIP aspirasi”

tersalurkan ke Sulawesi Tengah. KIP itu diserahkan ke sejumlah pelajar di berbagai universitas atau perguruan tinggi swasta maupun negeri di Sulteng.

“Kami akan terus berusaha agar harapan pendidikan bisa terus berjalan,” katanya.

Bukan cuma itu, puluhan paket program bantuan lainnya melalui aspirasi Sakinah juga sudah tersalurkan di Sulteng.

Bantuan itu ada yang berupa perangkat pendukung pendidikan, hingga sarana pelaksanaan pendidikan.

Bagi Sakinah, pelajar adalah aset negara, sehingga pemerintah harus hadir ketika mereka membutuhkan.

“Anggarannya ada. Saya merasa rugi kalau tidak ada yang konsen di komisi tersebut.”

Johan Rosihan **Resmikan** Program Budidaya Lele di Dompu

KUTIPAN

Kabupaten Dompu (25/12) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, didampingi Wakil Bupati Dompu melakukan peresmian budidaya lele dengan sistem bioflog Dompu, Jum'at, (25/12/2021).

Dalam sambutannya, politisi PKS itu menyampaikan agar fasilitas dan bantuan yang diberikan okeh pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga pada saatnya nanti bisa menunjang perekonomian masyarakat.

"Ini adalah bantuan dari pemerintah. Karenanya, saya berharap masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik. Saya juga berharap kepada penyuluh agar terus mendampingi masyarakat kita di lapangan agar budidaya ini bisa terus berkesinambungan." Ungkap Johan

Wakil Bupati Dompu yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan ucapan terimakasih kepada Anggota Komisi IV DPR RI yang telah

memilih Dompu sebagai lokasi program dari KKP.

"Saya berharap bisa bersinergi dalam banyak hal," ungkap politisi yang juga merupakan Sekretaris Fraksi PKS MPR tersebut.

Ia bahkan menyebut bahwa JR, sapaan akrab politisi asal Sumbawa itu, adalah sahabat baik sejak masih sama-sama menjadi pejabat publik di Mataram.

Saat itu, ia menjabat di Dinas PUPR Provinsi NTB dan Johan Rosihan adalah masih menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi NTB.

"Pak Johan ini adalah sahabat baik saya sejak dulu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di acara ini. Kedepan, saya harap sosok Pak

Johan yang saya kenal betul sejak dulu, bisa membantu mewujudkan visi misi kami di Dompu ini," Kata Syahrul Parsan.

Perlu diketahui, selain program budidaya ikan lele menggunakan metode bioflog dari KKP, Johan juga menjadikan Dompu sebagai lokasi program-program lain seperti UPP0 dari Kementan, KBR dari KLHK yang telah tersebar di banyak titik dan masih banyak lagi.

Berkali-kali kepada awak media ia mengatakan agar keberadaannya di Senayan dimaksimalkan dengan baik.

"Berkali-kali saya sampaikan, silahkan maksimalkan keberadaan saya di Senayan. Ayo sama-sama bangun daerah kita. Saya yakin dengan kolaborasi dari para pemimpin di semua tingkatkan, banyak hal yang bisa kita lakukan," tutup Johan.



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

"Ini adalah bantuan dari pemerintah. Karenanya, saya berharap masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik. Saya juga berharap kepada penyuluh agar terus mendampingi masyarakat kita di lapangan agar budidaya ini bisa terus berkesinambungan"



Saat Reses, Toriq Ajak Generasi Muda **Optimis** dengan Berkegiatan Positif di Masa Pandemi

KUTIPAN

Sebagai seorang ulama, Toriq menyebutkan, optimis dalam menghadapi masa sulit dan berucap kata-kata yang baik merupakan ajaran Nabi saw dalam hadits dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu. Sehingga sudah sepatutnya orang beriman menjalankan nasehat Nabi.

Tasikmalaya (26/12) — Disaat Reses, Anggota DPR RI asal Fraksi PKS Toriq Hidayat mengajak para peserta kegiatan yang bertajuk 'Kemah Anak Istimewa' untuk tetap optimistis dengan mengikuti berbagai kegiatan positif di masa Pandemi.

"Sebagian dari kita mungkin ada yang berkeluh-kesah karena merasa terpuruk dan kesulitan melewati masa pandemi Covid-19. Namun Islam mengajarkan pemeluknya untuk tetap yakin bahwa tidak ada penyakit menular tanpa izin Allah SWT," ajaknya, di Bumi Perumahan Batu Mahpar. (22/12/2021).

Sebagai seorang ulama, Toriq menyebutkan, optimis dalam menghadapi masa sulit dan berucap kata-kata yang baik merupakan ajaran Nabi saw dalam hadits dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu. Sehingga sudah sepatutnya orang beriman menjalankan nasehat Nabi.

"Maksud berbicara positif dalam hadis ini bisa dalam bentuk kegiatan positif di luar ruangan. Dalam sebuah survei terkuak pandangan masyarakat bahwa memilih rekreasi di alam terbuka serta ruang hijau maka kesejahteraan dan kesehatan mental menjadi lebih optimal," paparnya.

Dalam kegiatan yang digagas oleh Bidang Pembinaan Anak Kader (PAA) DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya, Toriq mengingatkan kepada panitia dan seluruh peserta yang terdiri dari anak usia didik SD- SMP ini agar protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 ditaati dan dilaksanakan dengan baik.

"Walaupun secara umum, saat ini, kasus Covid-19 di Tasikmalaya melandai dan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) masih aman. Saya berharap anak-anakku sekalian dan Bapak serta Ibu panitia agar disiplin menjalankan Prokes yang dibuat untuk kegiatan ini," pintanya.

Toriq juga menyampaikan dihadapan peserta, bahwa berbagai bencana termasuk wabah di masa kenabian Muhammad SAW seperti sekarang ini belum tentu sebagai hukuman dan kemurkaan Allah SWT.

"Namun sebagai batu ujian yang akan membuat diri kita semakin dekat dengan Sang Pencipta," tutup Toriq.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

"Ini adalah bantuan dari pemerintah. Karenanya, saya berharap masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik. Saya juga berharap kepada penyuluh agar terus mendampingi masyarakat kita di lapangan agar budidaya ini bisa terus berkesinambungan"





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Salurkan
ASPIRASI ANDA
DI HARI ASPIRASI
FRAKSI PKS DPR RI

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan
setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>

Fraksi PKS DPR RI Siap Perjuangkan Kesejahteraan Dosen Tetap Non-PNS

KUTIPAN

Jakarta (14/12) – Legislator Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menerima kunjungan dan penyampaian aspirasi dari Ikatan Dosen Tetap Non-PNS Republik Indonesia (IDTNPNSRI),

mengenai permasalahan status dan kesejahteraan dosen tetap non-PNS di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Islam Negeri pada Selasa (14/12) pagi secara virtual.

IDTNPNSRI merupakan forum dengan anggota sekitar 9500an dosen tetap berstatus non-PNS di perguruan tinggi di Indonesia. Dosen-dosen tersebut direkrut melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 3/2016 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) No. 84/2013. Dalam UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, nomenklatur dosen tetap non-PNS tidak tercantum, sehingga keberadaan mereka tidak memiliki kepastian secara hukum.

“Kami direkrut berbasis kontrak. Jadi, kontraknya

hampir semua menyeluruh itu per 2 tahun. Kontrak itu dibangun dari perguruan tinggi masing-masing sehingga implikasi dari kontrak ini juga bergantung secara “politik” pada goodwill pimpinan universitas masing-masing. Jika berbaik-baik pada pimpinan, maka baik pula [imbalan] yang didapatkan. Jika tidak, maka keluar ancaman, “Mau diperpanjang gak [statusnya]?”” ungkap Ketua Umum IDTNPNS RI, Mohammad Nor Afandi.

Para dosen tetap non-PNS tersebut juga menghadapi masalah lain karena ketidakjelasan status hukum mereka. Mulai dari kualifikasi akademik yang ketentuannya berbeda di setiap perguruan tinggi, tidak adanya kesempatan untuk menduduki jabatan fungsional seperti senat atau rektor, serta tidak dapat mengajukan sertifi-

kasi dosen untuk membuktikan profesionalitas mereka.

“Isu rekrutmen PPPK 2022 akan mengancam kami karena ada informasi bahwa rekrutmen PPPK melalui formasi umum. Ketika sudah formasi umum, bagaimana kemudian nasib kita? Informasi yang simpang siur ini kami ingin memastikan, paling tidak dari Komisi X bisa menjelaskan persoalan-persoalan ini,” sambung dosen UIN Jember tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Fikri selaku Wakil Ketua Komisi X berkata bahwa problematika pendidikan tinggi ini belum terekspos oleh Kemendikbud-ristek yang sebelumnya tidak membawahi pendidikan tinggi, sehingga masih terdapat transisi dan belum ada pengawalan. Fikri menekankan kepada IDTNPNSRI untuk terus menyurati Komisi X, kementerian terkait, serta memanfaatkan masa reses DPR mulai tanggal 17 Desember nanti untuk mengangkat masalah status dan kesejahteraan dosen ke permukaan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

“Salah satu tujuan berdirinya negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru dan dosen bukan hanya mengangkat nama Indonesia, tapi berkontribusi sejak awal dalam pembentukan SDM. Saya minta semua ditulis, bersurat ke Komisi X. Kalau Komisi X belum jelas, bersurat lagi saja. Kalau memang sudah ada jadwalnya, ya ditegaskan lagi, nanti saya akan mengawal. Kalau tidak ada yang memimpin, saya yang memimpin nanti

Hari Migran Internasional, Politisi PKS Minta Perlindungan PMI Lebih Ditingkatkan

KUTIPAN

Jakarta (18/12) — Migrasi sudah menjadi satu keniscayaan dalam dunia global. Hingga tahun 2020 PBB mengestimasi sebanyak 281 juta manusia merupakan migran yang setara dengan 3,6% populasi dunia, dimana 169 juta diantara mereka adalah pekerja migran (PBB, 2020), dan 9 juta diantaranya berasal dari Indonesia (World Bank, 2020).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati dalam momen Hari Pekerja Internasional meminta negara lebih serius membela hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Mufida menerangkan, anak-anak bangsa yang berkarya di berbagai penjuru dunia tak sedikit jumlahnya. Mereka telah memberikan sumbangsih yang sangat besar. Sumbangan devisa negara yang diberikan pekerja migran terbesar kedua setelah migas sebesar Rp 159,7 triliun.

"Maka menjadi kewajiban negara untuk melindungi PMI. Memastikan hak-hak mereka tertunaikan, mempermudah setiap kewajiban, memastikan keamanan sebelum bekerja, saat bekerja hingga kembali pulang ke Tanah Air," ujar Mufida dalam keterangannya, Sabtu (18/12/2021).

Terlebih saat pandemi, berbagai kesulitan masih dihadapi teman-teman PMI. Penempatan ke negara-negara tujuan harus terus diupayakan dan dipermudah.

"Perlindungan dan

advokasi dari dampak-dampak pandemi di negara-negara usai penempatan juga harus jadi perhatian," ujar dia.

Mufida meminta jaring pengaman juga mesti disiapkan. Termasuk nanti saat menjadi purna pekerja migran, Mufida berharap mereka bisa masih bisa produktif di daerah masing-masing dan menjadi motor penggerak di wilayah dan daerah.

"Tak kalah penting adalah perhatian khusus kepada keluarga PMI. Penguatan ketahanan keluarga PMI tidak bisa ditawar. Pengorbanan teman-teman PMI juga meninggalkan risiko yang tak mudah bagi keluarga yang ditinggalkan. Ada pendampingan, ada perhatian, ada penguatan bagi keluarga agar tetap kukuh dan kuat," ungkap dia.



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

“Menjadi kewajiban negara untuk melindungi PMI. Memastikan hak-hak mereka tertunaikan, mempermudah setiap kewajiban, memastikan keamanan sebelum bekerja, saat bekerja hingga kembali pulang ke Tanah Air. Terlebih saat pandemi, berbagai kesulitan masih dihadapi teman-teman PMI. Penempatan ke negara-negara tujuan harus terus diupayakan dan dipermudah. Perlindungan dan advokasi dari dampak-dampak pandemi di negara-negara usai penempatan juga harus jadi perhatian”

Sambut Hari Ibu, Nevi **Hadiri** Perkumpulan Indojalito Sekaligus Menjadi Juri Lomba

KUTIPAN

Jakarta (19/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Daerah pemilihan Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, dalam rangka merayakan hari ibu tanggal 22 Desember nanti, menghadiri silaturahmi yang diadakan komunitas perempuan minang di rantau yang bernama Indojalito.

Komunitas yang sudah berumur 22 tahun dan tetap eksis ini menunjukkan kesolidan perempuan minang di tanah rantau.

"Alhamdulillah kita para perempuan minang masih tetap terus menjaga silaturahmi, meningkatkan solidaritas dan sekaligus memperkuat rasa persaudaraan. Momen Hari Ibu menjadi sarana pertemuan kita sambil memaknai hari ibu sebagai kekuatan utama tegaknya sebuah keluarga, juga sekaligus bertukar pikiran dan pengalaman yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan perantara yang hadir", tutur Nevi.

Legislator Sumbar yang duduk di Komisi VI DPR RI ini didaulat menjadi juri lomba Pakaian terbaik yang menambah kemeriahan dan kehangatan acara hari ibu ini.

Dengan dresscode Tenun Nusantara, Nevi dan seluruh komunitas Indojalito ini dijadikan juga lomba pakaian terbaik yakni Lomba Pakaian Baju Khas Minang dimana istri Gubernur Sumbar 2010 - 2021 (Bapak Irwan Prayitno) ini juga menjadi Jurinya.

"Saya menyampaikan, bahwa setiap ibu yang ada di negeri ini akan menjadi blue print atau master dari situasi keluarga yang terbentuk dalam

sebuah rumah tangga. Untuk itu, posisi strategis seorang ibu mesti dioptimalkan agar anak-anak yang ada dalam keluarga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat baik secara biologis maupun ideologis", tutur Nevi.

Politisi PKS ini memandang, bahwa ibu memiliki peran penting di era pandemi Covid-19 ini. Sebagai perempuan, yang paling utama dilakukan di tengah keluarga dan masyarakat adalah bersyukur kepada Allah SWT karena kemuliaan yang diberikan-Nya. Bagaimana setiap insan perempuan Indonesia, harus dapat menyelami sejarah kehidupan para tojoh bangsa yang dapat menjadi tauladan bagi kaum perempuan Indonesia.

"Masyarakat yang baik lahir dari Ibu yang baik. 'Ibu (an-Nisa') adalah tiang negeri' (al-Hadist). Jika kaum perempuan dalam suatu negeri berbudi pekerti baik (shalihah), niscaya akan sejahtera negeri itu", Kata Nevi merujuk.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Daerah Sumatera Barat II

"Semoga komunitas Indojalito ini semakin besar, dan juga dapat menjadi agen perubahan yang lebih baik bagi kaum wanita minang di perantauan dan seluruh wanita Indonesia pada umumnya. Silaturahmi kita makin kuat, dan semangat kekeluargaan kita juga kuat, yang pada ujungnya memberikan kontribusi pada negara pada bidang apapun mulai Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya"

Gelar Apel Siaga di Hari Ibu, Wakil Ketua FPKS: Pengokohan Peran Perempuan Membangun Peradaban

KUTIPAN

Cirebon (23/12) --- Memaknai Hari Migran Internasional, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dan Hari Ibu, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Bidang Kesejahteraan Sosial Netty Prasetyani menyelenggarakan Apel Siaga di Pantai Kesenden, Kota Cirebon, Selasa, (22/12/2021).

Menurut Netty, Hari Ibu harus dimaknai sebagai momentum pengokohan peran komprehensif perempuan di segala aspek kehidupan, baik peran dalam keluarga maupun di ranah publik.

"Peran komprehensif perempuan tidak bisa dilepaskan dari upaya membangun peradaban. Ibu adalah unsur penting di dalam keluarga, sekaligus ia adalah agen penggerak dan agen perubah di tengah masyarakat, baik di bidang pendidikan

dan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya" kata Netty.

Perempuan, kata Netty, telah mendapat anugerah luar biasa dari Tuhan berupa kemampuan multi talenta dan multitasking sehingga mampu mencapai titik keseimbangan yang mengagumkan dalam menjalani peran komprehensif tersebut.

"Satu tangannya mengayun buaian, sementara satu tangan lainnya dapat menggunakan dunia memperjuangkan

keadilan dan kesejahteraan untuk sesama," katanya.

Acara Apel Siaga dilanjutkan dengan peresmian program padat karya Kesenden, pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan, pembagian nutrisi ibu dan balita, sentra bermain bersama anak-anak, serta berdialog dengan para ibu pengolah ikan asin.

Netty Prasetyani dalam pesannya selaku pembina upacara menyampaikan bahwa anak-anak Indonesia rentan akan masalah kesehatan seperti stunting, narkoba dan pergaulan bebas, Covid-19 dan sebagainya.

"Saat kondisi pandemi seperti ini, ada banyak potensi pengabaian hak-hak anak. Misalnya, posyandu yang menjadi ujung tombak imunisasi anak di lapangan tidak berjalan akibat Covid-19. Akhirnya perkembangan anak tidak terpantau dengan baik. Angka kematian anak akibat kasus Covid-19 juga tinggi," katanya.

Menurut Netty, peran Ibu sangat penting dalam menjaga ketahanan dan melindungi keluarga di masa pandemi.

"Ibu dapat menjadi sumber informasi dan kunci kesehatan bagi keluarganya. Ibu juga adalah orang yang paling dipercaya untuk mengedukasi keluarga agar disiplin menerapkan protokol 3 M. Peran ibu juga penting memastikan semua rumah dan keluarga menyediakan alat perlindungan diri yang standar seperti



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VIII

"Peran komprehensif perempuan tidak bisa dilepaskan dari upaya membangun peradaban. Ibu adalah unsur penting di dalam keluarga, sekaligus ia adalah agen penggerak dan agen perubah di tengah masyarakat, baik di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya

kebutuhan masker, sabun, dan hand sanitizer," katanya.

Peran ibu, menurut Netty, tidak hanya dari aspek kesehatan, tapi juga dalam aktivitas ekonomi keluarga.

"Adakalanya Ibu menjadi pencari nafkah utama keluarga,

bahkan hingga pergi ke negeri jiran sebagai pekerja migran. Mereka menjadi penggerak ekonomi keluarga dan juga ekonomi bangsa melalui devisa," ungkapnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Sambut Hari Ibu, Aleg PKS Gelar Lomba Menyanyikan Mars PKS untuk Bangkitkan Semangat Perempuan

KUTIPAN

Kota Bandung (22/12) – Anggota Legislatif Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah memberikan sambutan dalam acara pengumuman Lomba Menyanyikan Mars PKS di DPD PKS Kota Bandung pada Rabu (22/12) pagi.

Lomba tersebut diselenggarakan oleh Ledia bagi konstituen perempuan di daerah pemilihannya, Jawa Barat I, dalam rangka memperingati Hari Ibu tahun 2021.

“Hari Ibu bagi orang-orang Barat. Bagi kita, Hari Ibu terinspirasi dari Kongres Perempuan Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kenapa kok aneh memperingati Hari Ibu malah nyanyi Mars PKS. Padahal, ini untuk membangkitkan lagi semangat para perempuan di Kota Bandung dan Cimahi,” ungkap Sekretaris Fraksi PKS DPR RI tersebut dalam sambutannya.

Ledia sangat mengapre-

siasi semangat dan kehadiran para peserta yang luar biasa dalam rangkaian lomba yang telah dimulai sejak 6 Desember lalu secara daring. Dalam acara pengumuman Lomba Menyanyikan Mars PKS itu pula, Anggota Badan Legislatif DPR itu turut melibatkan berbagai UMKM di Kota Bandung sebagai sponsor acara tersebut.

“Dalam kondisi pandemi ini, persoalan terbesarnya adalah kesulitan ekonomi, terutama di tingkat masyarakat. Makanya, kita ambil kesempatan. Kita dorong supaya UMKM bisa terlibat. Seumur-umur lomba nyanyi hadiahnya cilok, bolen, segala macam, karena kita ingin mendorong UMKM,” tutur Ledia.

Acara pengumuman pemenang Lomba Menyanyikan Mars PKS diawali dengan sambutan dari Bendahara Umum DPD PKS Kota Bandung sekaligus Anggota DPRD Kota Bandung Agus Andi Setyawan serta Anggota DPRD Kota Bandung lainnya, yakni Susi Sulastri dan Salmiah Rambe. Penentuan pemenang ditentukan oleh tiga orang juri, yakni seniman Daan Aria, Hendra Gunawan dari Bidang Senbud DPW PKS Provinsi Jawa Barat, serta Dhika Anugerah dari Bidang Senbud DPD PKS Kota Bandung. Acara juga dihadiri oleh perwakilan BPKK (Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga) DPD PKS Kota Bandung dan Kota Cimahi, serta dimeraiahkan dengan penampilan musik dari grup milenial SEBA.

z.Para pemenang Lomba Menyanyikan Mars PKS berturut-turut adalah sebagai berikut. Juara 1 disabet oleh Grup SACA dari STIE Tridharma, Juara 2 dimenangkan oleh Grup Inaba Choir dari STIE Inaba, dan Juara 3 sekaligus titel Juara Favorit dianugerahkan kepada



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat I

“Hari Ibu bagi orang Indonesia berbeda dengan orang Barat. Bagi kita, Hari Ibu terinspirasi dari Kongres Perempuan Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kenapa kok aneh memperingati Hari Ibu malah nyanyi Mars PKS. Padahal, ini untuk membangkitkan lagi semangat para perempuan di Kota Bandung dan Cimahi,”

Grup Baladewa Oke (BALOK) yang beranggotakan ibu-ibu yang berdomisili di Jalan Baladewa, Pajajaran, Bandung.

Adapun Juara Harapan 1, 2, dan 3 secara berturut-turut dimenangkan oleh Grup Abinaya

dari STIKES Budiluhur Cimahi, Grup Accent Voice dari STIE Tridharma, dan Grup Shaka Voice yang beranggotakan guru-guru SMP Swasta PGRI Cibeureum

Pada Peringatan Hari Ibu, Nevi Zuairina **Jadi** Tokoh Inspiratif Penyiaran

KUTIPAN

Padang (23/12) --- Sebuah kejutan bagi Anggota DPR RI Nevi Zuairina, sehari menjelang Hari Ibu 22 Desember mendapat Anugerah Tokoh Inspiratif pada Anugerah KPID Sumbar 2021.

"Kami memberikan penghargaan tersebut karena menilai beliau selalu memberikan inspirasi termasuk dalam bidang penyiaran, dari kami jika meminta beliau sebagai narasumber di Radio maupun Televisi selalu menyempatkan di tengah waktu sibuk beliau," ujar Komisiner KPID Sumbar Yumi usai Anugerah KPID di Auditorium Istana Gubernur. Selasa (21/12/2021).

Harapan Komisiner KPID dan seluruh insan media di Sumbar agar Nevi Zuairina menjadi tokoh inspiratif, semoga selalu juga menjadi inspirasi khususnya buat perempuan-perempuan Sumatera Barat.

"Selamat Ibu Nevi Zuairina, teruskan menginspirasi perempuan, UMKM dan PAUD,"

ujar Yumi.

Nevi Zuairina dihubungi Selasa malam mengatakan anugerah dari KPID Sumbar melecet dirinya untuk terus bekerja dan berkinerja sebagai perempuan pejuang aspirasi Sumbar.

"Anugerah ini seperti amunisi bagi ibu dalam menerbar inspirasi kepada semua dan menjadi cemeti semangat menjadi pejuang aspirasi masyarakat Sumbar di DPR RI," ujar Anggota DPR Komisi VI ini.

Legislator Sumbar II ini juga mengucapkan terima kasih kepada media baik televisi, radio, cetak dan online.

Menjelang moment Hari Ibu mendapat anugerah Tokoh penyiaran yang inspiratif, Hj. Nevi mengajak setiap insan media untuk mendidik

masyarakat semakin memaknai hari ibu. Bahwa setiap ibu yang menjadi bagian bangsa dan negara juga punya kewajiban mencerdaskan bangsa selain keluarganya.

Momen Hari Ibu menjadi sebagai kekuatan utama tegaknya sebuah keluarga, juga sekaligus sebagai titik tolak untuk peningkatan ilmu pengetahuan yang akan di hadirkan dalam keluarga.

"Anugerah ini karena sahabat sahabat media semua. Pesan ibu kepada insan media di Sumbar teruslah menjadi pencerdas masyarakat dan tetap berkarya sesuai kaidah jurnalistik serta profesional untuk bersama-sama kita membangun bangsa," Tutup Nevi Zuairina.



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

"Anugerah ini karena sahabat sahabat media semua. Pesan ibu kepada insan media di Sumbar teruslah menjadi pencerdas masyarakat dan tetap berkarya sesuai kaidah jurnalistik serta profesional untuk bersama-sama kita membangun bangsa'

Dialog Publik Hari Ibu, Saadiyah **Usulkan** Perlindungan Perempuan Maluku

KUTIPAN

Ambon (24/12) — Perempuan dalam kehidupan sosial adalah aset, potensi, dan investasi bagi Maluku. Dengan kompetensi yang dimilikinya, perempuan Maluku dapat berkontribusi secara signifikan.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Saadiyah Uluputty ST saat menjadi Narasumber pada Dialog Publik memperingati Hari Ibu Ke 93 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku di Kawasan Karang Panjang Ambon (Kamis, 23/12/2021).

Dialog Publik yang mengangkat tema Demokrasi dan Perlindungan Perempuan digelar oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Maluku bekerjasama dengan sejumlah OKP seperti HMI, GMKI, IMM, PMIL. Puluhan aktifitas kemahasiswaan dan OKP di Maluku terlibat dalam dialog tersebut.

Saadiyah mengurai, perempuan Maluku telah menunjukkan kiprahnya, tidak hanya dalam

ruang privat namun juga di ruang domestik publik.

“Kecerdasan serta kepriawain perempuan Maluku tidak dapat dianggap remeh. Perempuan Maluku adalah aset yang dapat berkontribusi di berbagai ranah pembangunan di Maluku” sebut Anggota Fraksi PKS Dapil Maluku ini.

Di tengah signifikansi peran perempuan baik lokal maupun nasional, Saadiyah mencatat masih banyak persoalan yang dihadapi oleh kaum perempuan. Kekerasan terhadap perempuan, sebut Saadiyah sebagai salah satu fakta yang kerap mengemuka.

“Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan

pada 2021 mencapai 299.991 kasus. Beberapa bentuk kekerasan terjadi, seperti kekerasan fisik, psikis dan ekonomi. Ini memprihatinkan”, kata Saadiyah.

Dirinya juga menyeroti masih rendahnya partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

“Perempuan Maluku mesti memasuki panggung lebih luas di ruang publik, politik parlemen, dan manajerial. Budaya yang masih menghambat perempuan, kurangnya dukungan publik, hingga berbagai hambatan sistemik harus diakhir”, detail Saadiyah.

Saadiyah mendorong agar perlindungan perempuan diberikan melalui perhatian nyata, konsisten dan sistematis, yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender.

“Peran para pemangku kepentingan terutama Pemerintah Daerah sangat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan program perlindungan hak

**SAADIYAH ULUPUTTY, S.T**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

“Perempuan Maluku mesti memasuki panggung lebih luas di ruang publik, politik parlemen, dan manajerial. Budaya yang masih menghambat perempuan, kurangnya dukungan publik, hingga berbagai hambatan sistemik harus diakhir”,

perempuan ini”, sarannya.

Perlindungan terhadap perempuan, akan memperkuat daya tawar perempuan dalam berbagai sektor seperti politik, ekonomi, dan sosial.

“Upaya ini dengan memastikan, kualitas dan kompetensi

perempuan Maluku semakin baik. Program – program peningkatan kompetensi perlu digiatkan. Termasuk mengawal implementasi regulasi daerah yang memberi perlindungan terhadap perempuan”, kuncinya.

Normalisasi Hubungan dengan Israel, HNW Desak Kemlu RI Klarifikasi Terbuka

KUTIPAN

Jakarta (24/12) --- Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, meminta agar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) segera melakukan klarifikasi terbuka, terkait adanya isu normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel, yang dihembuskan secara sepihak di beberapa media.

Pria yang akrab disapa HNW mememinta kepada Menlu dan para pejabat negara lainnya agar tetap memegang komitmen konstitusional historis bangsa Indonesia untuk tetap mendukung perjuangan bangsa Palestina hingga mencapai kemerdekaannya secara penuh.

"Isu sensitif yang digulirkan beberapa media di dalam dan luar negeri soal 'normalisasi' hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel ini penting segera diklarifikasi secara tegas dan terbuka oleh Menlu RI, agar tidak menimbulkan spekulasi yang tidak kondusif yang menghadirkan kegaduhan di masyarakat Indonesia, yang sekalipun masih dilanda covid-

19 tapi tetap memegang konsistensi Pembukaan UUD 1945 yang menolak penjajahan," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (24/12).

HNW mengatakan isu normalisasi ini dimunculkan dengan dikaitkan dengan Menlu AS; Antony Blinken pasca pertemuannya dengan Menlu RI Retno Marsudi, pekan lalu.

Sebagaimana dikutip sejumlah media, pejabat Israel mengatakan bahwa salah satu yang dibahas adalah kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dengan Indonesia. Juru Bicara Sekretaris Gedung Putih Ned Price juga mengisyaratkan adanya pembicaraan tersebut,

meski dilakukan tertutup. Sebelumnya, Menteri

Pertahanan Prabowo Subianto juga dikabarkan berdiskusi dengan Kuasa Usaha Israel untuk Bahrain Italy Tagner di Bahrain dalam sebuah konferensi internasional.

Pertemuan yang tidak biasa ini menimbulkan dugaan adanya pembicaraan kemungkinan normalisasi, walau kemudian dibantah oleh Juru Bicara Prabowo bahwa pertemuan itu sangat singkat dan tidak disengaja. Dan bahwa sikap Menhan Prabowo tetap membela perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina.

"Saya mengingatkan agar para menteri ekstra waspada, dan jangan menjadi korban dari main apinya loby Yahudi, yang dengan berbagai jurus, terus mendesakkan agenda normalisasi dengan Indonesia, sekalipun mereka tahu bahwa hal itu bertentangan dengan Konstitusi Indonesia," tegas HNW.

Mestinya, kata HNW, semua pihak mengapresiasi dan tegak lurus dengan konsistensi sikap resmi Indonesia baik Pemerintah maupun Parlemen. Dan para Menteri tentu diapresiasi bila sikap mereka



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI

"Ketika isu normalisasi ini dihembuskan, sangat dipentingkan Menlu untuk segera mengkoreksi isu yang dihembuskan oleh media Israel dllnya itu, karena isu normalisasi tersebut mengecewakan Palestina, dan tidak sesuai dengan komitmen dan track record sikap resmi Indonesia membela perjuangan Palestina untuk meraih kemerdekaannya,"

justru mempertahankan dan memperjuangkan pernyataan dan sikap resmi Presiden Joko Widodo yang menegaskan untuk terus membela perjuangan bangsa Palestina hingga meraih

kemerdekaannya, dan karenanya tidak membuka normalisasi hubungan dengan Israel.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dampingi Dr. Salim di Kepri, Nevi Zuairina **Terima** **Amanat** PKS Milik Semua Warga Indonesia

KUTIPAN

"KMS menyampaikan bahwa PKS adalah milik semua tokoh dan kalangan. Silahkan gunakan, silahkan besarkan. Saya tidak meminta dukungan dan doa karena itu berarti memisahkan PKS dengan orang luar, PKS ini milik anda semuanya", kata Nevi Menerangkan.

Batam (27/12) — Gelar Silaturahmi Kebangsaan dengan para tokoh Kepulauan Riau di Kota Batam oleh Ketua Majelis Syuro (KMS) PKS Dr Salim Segaf Al Jufri, Anggota DPR RI Komisi VI Nevi Zuairina turut mendampingi, agar amanat-amanat yang disampaikan KMS dapat di implementasikan juga di berbagai daerah di Indonesia.

Pertemuan ini dihadiri mantan Gubernur, pejabat publik, Anggota DPR RI salah satunya Nevi, Anggota DPD RI, tokoh ormas dan ulama di kota Batam.

"KMS menyampaikan bahwa PKS adalah milik semua

tokoh dan kalangan. Silahkan gunakan, silahkan besarkan. Saya tidak meminta dukungan dan doa karena itu berarti memisahkan PKS dengan orang luar, PKS ini milik anda semuanya", kata Nevi Menerangkan.

Legislator asal Sumatera Barat ini mengutip apa yang ditekankan oleh KMS bahwa, saat ini sistem demokrasi di Indonesia memungkinkan perubahan untuk membangun negeri bisa dilakukan lewat partai politik.

"Jadi semua pihak dipersilahkan menggunakan partai politik ini untuk kepentingan kebaikan. Kondisi ini akan penting dilakukan bila

parlemen jalanan dirasa tidak berlaku," ungkapnya.

Nevi menambahkan, bahwa salah satu amanat yang penting untuk di perkuat adalah, banyak manuskrip-manuskrip sejarah di Indonesia yang tersebar di daerah-daerah perlu di rawat dan dijaga dengan baik.

"Manuskrip dan koleksi kitab yang banyak dari tahun 1700-an, bukan saja ada di Kepulauan Riau, bahkan seluruh Sumatera pun banyak menyimpan kekayaan sejarah ini yang perlu dilestarikan, bila dan doa karena itu berarti memisahkan PKS dengan orang luar, PKS ini milik anda semuanya", kata Nevi Menerangkan.

Amanat-amanat dari KMS ini, kata Nevi, bukan saja untuk teman-teman di Kepri, tapi berlaku untuk berbagai daerah yang memiliki kemiripan budaya dan bahasanya.

"Kita semua berharap, PKS menjadi harapan dan sandaran setiap warga untuk bersama-sama membangun kebersamaan untuk menebar kebaikan dimanapun berada", tutup Nevi Zuairina



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

"Salah satu amanat yang penting untuk di perkuat adalah, banyak manuskrip-manuskrip sejarah di Indonesia yang tersebar di daerah-daerah perlu di rawat dan dijaga dengan baik. Manuskrip dan koleksi kitab yang banyak dari tahun 1700-an, bukan saja ada di Kepulauan Riau, bahkan seluruh Sumatera pun banyak menyimpan kekayaan sejarah ini yang perlu dilestarikan, bila perlu dengan anggaran APBD atau APBN



1 JANUARI

Selamat Milad

Dr.
HERMANTO,
S.E., M.M

Semoga senantiasa
diberi kesehatan dan
keberkahan dalam
usianya